

NOTA DINAS
Nomor 20/ND/XIX.PNK/1/2025

Kepada Yth. : Tortama KN VI
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024
Tempat, Tanggal : Pontianak, 31 Januari 2025

Sehubungan keputusan Sekretaris Jenderal nomor 286/K/X-XII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 perihal Pelaporan Kinerja pada unit-unit pelaksana BPK, bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan kinerja tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan,

Winner Franky Halomoan Manalu
NIP 198002092006041002 

Tembusan:

1. Kepala Direktorat PSMK
2. Inspektur PIMK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama tahun 2024, dan merupakan wujud transparansi serta akuntabilitas sebagai satuan kerja BPK yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, laporan ini juga dijadikan sebagai salah satu media penyampaian informasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.



LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 memuat di antaranya kemajuan atas 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dari 13 IKU tersebut, 12 IKU dapat tercapai dengan baik bahkan melebihi target yang telah ditetapkan serta masih terdapat satu IKU yang belum berhasil mencapai target.

Selain capaian kinerja tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga berhasil memperoleh capaian dan prestasi melalui penghargaan internal BPK maupun eksternal. Capaian dan prestasi tersebut diantaranya Peringkat II Pemutakhiran Data Mandiri Terbaik untuk Jumlah Pegawai ≤ 150 pegawai yang diselenggarakan oleh Biro SDM dan Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I TA 2024 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00 kategori pagu >15M s.d. 25M yang diselenggarakan oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Hal yang tak kalah membanggakan, yakni ditetapkannya *best practice* “Dashboard Histoper” sebagai *best practice* tahun 2024 oleh Direktorat PSMK. Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan komitmen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat periode 2020 – 2024. Harapannya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat terus meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, mengembangkan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta adaptif dengan perubahan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, serta dapat dipahami dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun mendatang. Kami juga berharap laporan ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan oleh Pimpinan BPK.

Pontianak, 31 Januari 2025

Kepala Perwakilan,

**Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP**

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
	Daftar Tabel	iii
	Daftar Gambar	iv
BAB I	Pendahuluan	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas dan Fungsi	1
	C. Struktur Organisasi	3
	D. Sumber Daya	6
	E. Isu strategis	10
BAB II	Perencanaan Kinerja	
	A. Perencanaan Strategis	13
	B. Target Kinerja	14
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	
	A. Hasil Evaluasi AKIP	17
	B. Capaian Kinerja	18
	1. IKU 1	24
	2. IKU 2	26
	3. IKU 3	27
	4. IKU 4	29
	5. IKU 5	30
	6. IKU 6	31
	7. IKU 7	33
	8. IKU 8	34
	9. IKU 9	35
	10. IKU 10	37
	11. IKU 11	39
12. IKU 12	41	
13. IKU 13	42	
	C. Analisa Efisiensi	44
	D. Perubahan Budaya Kerja	47
	E. Realisasi Anggaran	47
	F. Inovasi	48

**BAB
IV**

Penutup

Lampiran

1.1. Profil ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional	8
1.2. Profil ASN Berdasarkan Jabatan Pelaksana	8
1.3. Perubahan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024	9
1.4. Rincian Anggaran RKP Tahun 2024	10
1.5. Rincian Anggaran RKSP Tahun 2024	10
2.1. Perubahan Anggaran Sasaran Kegiatan dan Sasaran Tahun 2024	15
2.2. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024	15
3.1. Rincian Nilai Komponen AKIP Tahun 2023 dan 2024	18
3.2. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	19
3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Lima Tahun Terakhir	21
3.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Lima Tahun	23
3.5. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 – 2024	24
3.6. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 – 2024	26
3.7. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 – 2024	27
3.8. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 – 2024	29
3.9. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 – 2024	30
3.10. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 – 2024	31
3.11. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 – 2024	33
3.12. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 – 2024	34
3.13. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 – 2024	36
3.14. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 – 2024	38
3.15. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 – 2024	40
3.16. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024	41
3.17. Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020 – 2024	43
3.18. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kinerja	48
4.1. Indikator Kinerja yang Mencapai dan Belum Mencapai Target	45

1.1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	3
1.2. Profil ASN Berdasarkan Golongan, Status Kepegawaian, Jabatan, dan Jenis Kelamin	7
1.3. Profil ASN Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan Masa Kerja di Perwakilan	7
1.4. Profil PTT Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin.....	8
1.5. Profil ASN Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan Masa Kerja di Perwakilan	9
2.1. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	13
2.2. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	14
3.1. Tren Capaian Evaluasi AKIP Tahun 2020 – 2024	17
3.2. Tren Skor Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2024	19
3.3. Budaya Kerja #TEGAS	40
3.4. Inovasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	49
3.5. Piala Penghargaan Internal	52
3.6. Piagam Penghargaan Eksternal	52

DAFTAR DIAGRAM

1.1. Komposisi SDM Menurut Jenis Jabatan	7
1.2. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan	8
1.3. Komposisi SDM Menurut Golongan	8
1.4. Komposisi SDM Menurut Status Kepegawaian	8
1.5. Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin	8
1.6. Komposisi SDM Menurut Masa Kerja di Perwakilan	8
3.1. Status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	28

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbarui melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan unsur penyelenggara negara, tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja tidak hanya melekat kepada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kementerian negara/lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan laporan kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-Unit Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai unit kerja pelaksana BPK wajib menyusun laporan kinerja yang merupakan dasar penyusunan Laporan Kinerja Pelaksana BPK. Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPK tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

B. TUGAS DAN FUNGSI

BPK merupakan suatu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam peraturan tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya ialah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI).

Berdasarkan Pasal 606 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

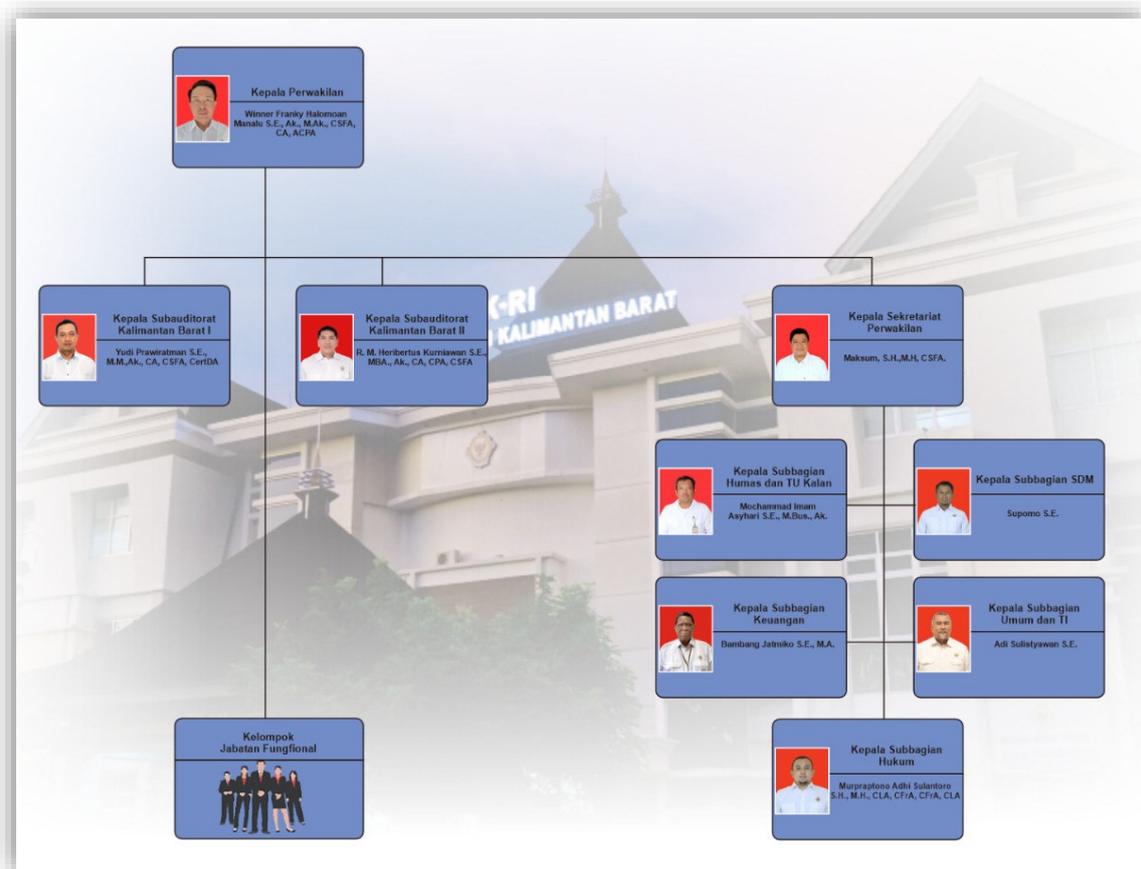
Pasal 607 Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 mengurai dua puluh fungsi yang diselenggarakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut.

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan melalui Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI nomor 1 Tahun 2019. Sesuai Pasal 605 peraturan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh tim manajerial dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, keuangan, sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh seorang kepala sekretariat perwakilan yang membawahkan lima subbagian dengan uraian tugas sebagai berikut.

Sekretariat Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan (Humas dan TU Kalan)

- melaksanakan layanan tata usaha perwakilan;
- melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan;
- mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan;
- pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja;
- penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Melaksanakan Layanan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK.

Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM)

- melaksanakan administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional;
- melaksanakan pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja pegawai.

Subbagian Keuangan

- menyusun dokumen penganggaran dan pemantauan;
- menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran; dan
- menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi (Umum dan TI)

- melaksanakan layanan administrasi umum;
- melaksanakan pengelolaan arsip dan teknologi informasi; dan
- melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Subbagian Hukum

- melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

2. Subauditorat Kalimantan Barat I

Subauditorat Kalimantan Barat I

Subauditorat Kalimantan Barat mempunyai tugas pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

3. Subauditorat Kalimantan Barat II

Subauditorat Kalimantan Barat II

Subauditorat Kalimantan Barat II mempunyai tugas pemeriksaan pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- merumuskan rencana kegiatan;
- mengusulkan tim pemeriksa;
- melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

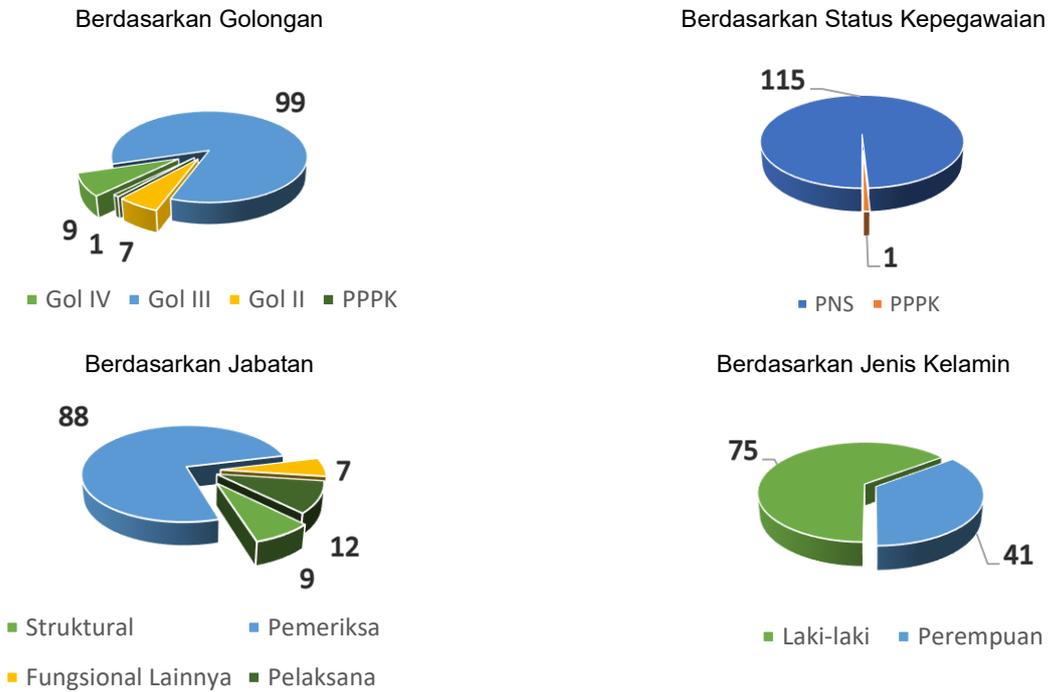
D. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

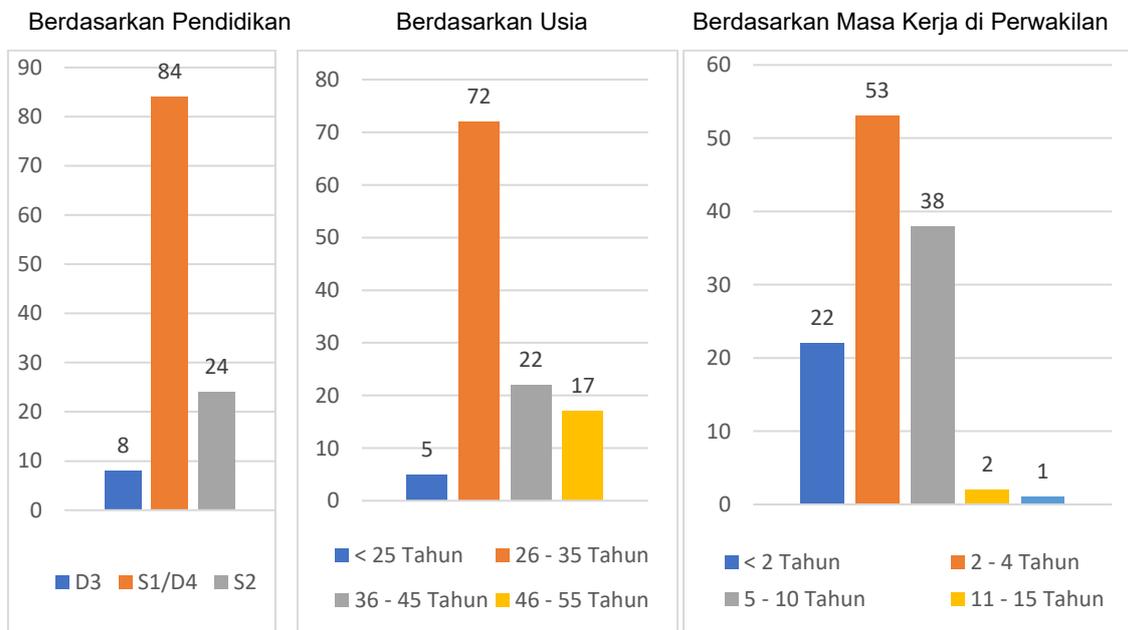
Sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2024 terdiri dari satu orang kepala perwakilan, satu orang kepala sekretariat perwakilan, dua orang kepala subauditorat, lima orang kepala subbagian, 88 pegawai pemeriksa, tujuh pegawai fungsional lainnya, 12 pegawai pelaksana, satu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 24 tenaga tidak tetap.

Profil pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam statistik berikut.

a. Profil Aparatur Sipil Negara (ASN)



Gambar 1.2. Profil ASN Berdasarkan Golongan, Status Kepegawaian, Jabatan, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.3. Profil ASN Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan Masa Kerja di Perwakilan

ber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2024 terdiri dari satu orang kepala perwakilan, satu orang kepala sekretariat perwakilan, dua orang kepala

Tabel 1.1. Profil ASN Berdasarkan Jabatan Fungsional

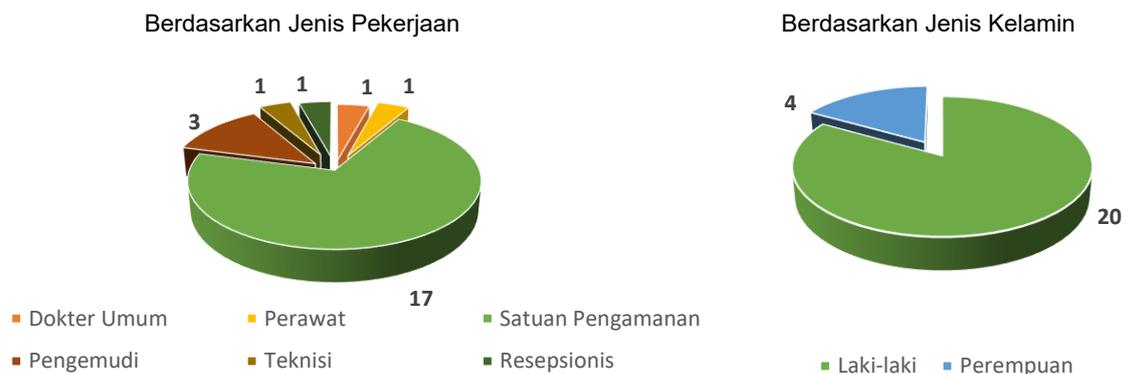
No	Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
1	JF Pemeriksa	-	-	73	12	3	88
2	Analisis SDM Aparatur	-	-	1	-	-	1
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	-	-	1	-	-	1
4	Pranata Keuangan APBN	-	2	-	-	-	2
5	Pranata Komputer	1	-	1	-	-	2
6	Arsiparis	-	-	1	-	-	1
Total							95

Tabel 1.2. Profil ASN Berdasarkan Jabatan Pelaksana

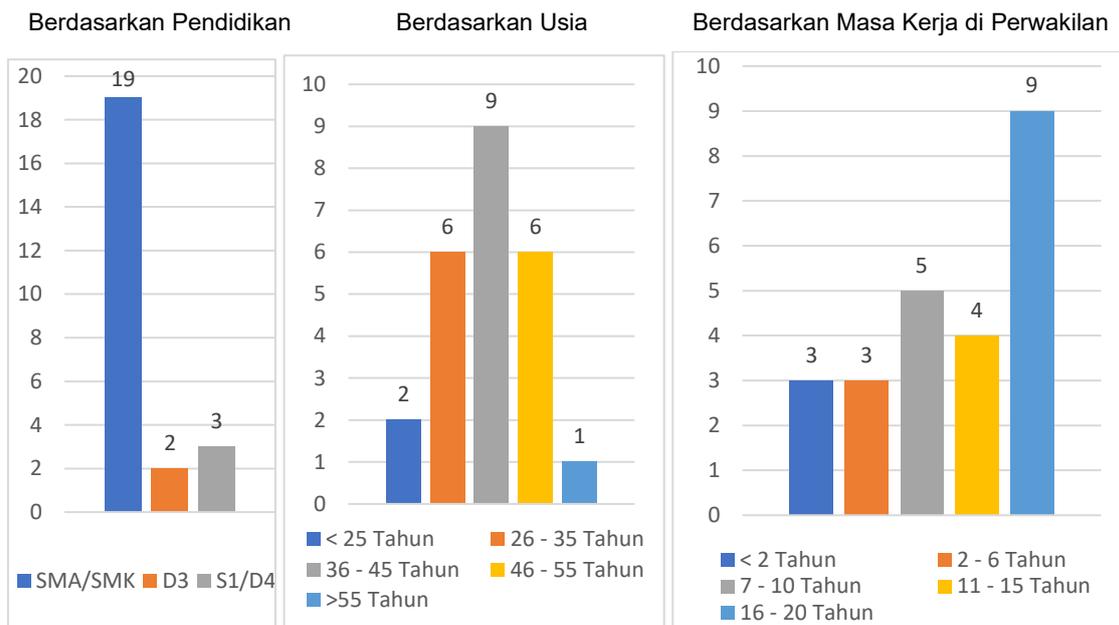
No	Jabatan Pelaksana	Jumlah
1	Penata Keprotokolan	1
2	Penata Layanan Operasional	1
3	Penelaah Teknis Kebijakan	6
4	Pengolah Data dan Informasi	3
5	Dokumentalis Hukum	1
Total		12

b. Profil Pegawai Tenaga Tidak Tetap (TTT)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dibantu oleh pegawai tenaga tidak tetap. Profil pegawai TTT dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.4. Profil PTT Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin



Gambar 1.5. Profil ASN Berdasarkan Pendidikan, Usia, dan Masa Kerja di Perwakilan

2. Sumber Daya Keuangan

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.802.955.000,0. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp25.660.174.000,0, atau turun sebesar 3.34%.

Selama tahun 2024 anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalami beberapa kali revisi. Diantaranya revisi penambahan anggaran belanja barang dalam rangka pemenuhan anggaran kegiatan mendesak dan prioritas TA 2024, blokir anggaran perjalanan dinas serta revisi pengurangan belanja pegawai. Lebih lanjut rincian revisi anggaran disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3. Perubahan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Revisi Anggaran	Pagu Revisi	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	Rp8.639.467.000	(Rp484.330.000)	Rp8.155.137.000	Optimalisasi Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang	Rp15.224.114.000	Rp838.717.000	Rp16.062.831.000	Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan 1 LHP Terinci PDDT Belanja Daerah di Kab Sintang dan Pemeliharaan Gedung Kantor
3.	Belanja Modal	Rp584.987.000	Rp	Rp584.987.000	-
Total		Rp24.448.568.000	Rp354.387.000	Rp24.802.955.000	

Alokasi anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kerja Setjen dan Penunjang (RKSP).

Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2024 senilai Rp9.149.841.000,- dengan target sebanyak 272 volume output dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 1.4. Rincian Anggaran RKP Tahun 2024

No	Kode RO	Rincian Output	Anggaram (Rp)	Target Volume RO
1	FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	Rp64.600.000	159 LHP
2	FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	RP14.134.000	1 Laporan
3	FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp94.193.000	2 Laporan
4	FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp12.615.000	15 Laporan
5	FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	Rp217.839.000	30 Laporan
6	FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	Rp.109.800.000	30 Laporan
7	FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Rp692.038.000	12 Laporan
8	FAF.U27	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Rp7.944.442.000	23 LHP
Jumlah 1 s.d. 8			Rp9.149.841.000	272

Sedangkan rincian anggaran Rencana Kerja Setjen dan Penunjang tahun 2024 senilai Rp15.653.114.000,- dengan target 81 volume keluaran disajikan pada table berikut.

Tabel 1.5. Rincian Anggaran RKSP Tahun 2024

No	Kode RO	Rincian Output	Anggaram (Rp)	Target Volume RO
1	EBA.994	Layanan Perkantoran	Rp13.292.800.000	1
2	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Rp234.828.000	57
3	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Rp350.159.000	2
4	FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp1.775.327.000	21
Jumlah 1 s.d. 4			Rp15.653.114.000	81

E. ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Tahun 2024, meliputi:

1. Pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kesalahan agar terhindar dari risiko hukum atas semua gugatan terhadap LHP yang diterbitkan;
2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum optimal khususnya terkait pengembalian dan rekomendasi atas LHP yang lama-lama;
3. Penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian daerah untuk kasus yang masih berupa informasi dari LHP BPK maupun hasil pemeriksaan APIP belum optimal dalam penetapan SKTJM-nya;
4. Kontinuitas program dan kegiatan yang ada pada pemerintah daerah sangat terpengaruh oleh adanya pergantian Kepala Daerah termasuk OPD terkait;
5. Isu penerapan SIPD di entitas bergantung pada kemampuan dan kebijakan kepala daerah dalam mendorong implementasinya;

6. Fokus kepada program pemerintah pusat yang ada di daerah perlu pengawasan, contoh penghematan anggaran dan program MBG bagi anak sekolah; dan
7. Adanya permohonan audiensi serta konsultasi yang diterima BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di luar kewenangan BPK, baik pertanyaan teknis pengelolaan program maupun penerapan peraturan perundang-undangan yang baru.

#TEGAS

Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Sinergy

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra BPK 2020–2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK 2020–2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara.

Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020 – 2024 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi BPK. Selain itu, Renstra BPK 2020 – 2024 merupakan pedoman penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan kebijakan seluruh unit kerja di BPK.

Visi, misi, nilai dasar, dan sasaran strategis dalam Renstra BPK 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut.

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara

Berdasarkan misi tersebut, BPK menyusun tiga misi, yaitu:

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugiannegara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Penyusunan visi dan misi berpijak pada nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh seluruh pegawai BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Nilai-nilai dasar tersebut terdiri dari Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

NILAI-NILAI DASAR

Independensi

- Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi

Integritas

- Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan

Profesionalisme

- Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku

Untuk mendukung tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjabarkan rancangan aktivitas selama lima tahun dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024 yang telah ditetapkan melalui peraturan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020–2024 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat . Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Renstra tersebut merupakan landasan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2020 – 2024, yaitu Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi. Hal ini sejalan dengan pengukuran kinerja melalui aplikasi Prisma setiap tahunnya sebagai bentuk monitoring pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan kontribusi pencapaian kinerja terhadap unit kerja di atasnya, yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara VI.



Gambar 2.1. Target Sasaran Kegiatan Eselon II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran Kegiatan Eselon II, Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi, merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Perwujudannya akan tercermin dari hasil program teknis yang menjadi produk utama BPK, yakni hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Melalui sasaran kegiatan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar, yang diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

B. TARGET KINERJA

1. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya untuk mencapai target mewujudkan kinerja dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selaku Eselon II dan Tortama KN VI selaku Eselon I dan atasan langsung Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Anggota VI BPK, Ketua BPK, dan Wakil Ketua BPK.

Sasaran kegiatan, anggaran, indikator kinerja dan target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 2024 dijabarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2.2. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Sepanjang Tahun 2024 anggaran sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengalami perubahan. Perubahan tersebut diantaranya penambahan anggaran belanja barang dalam rangka pemenuhan anggaran kegiatan mendesak dan prioritas TA 2024, blokir anggaran perjalanan dinas, serta revisi pengurangan belanja pegawai. Secara umum perubahan anggaran tersebut menyebabkan kenaikan anggaran yang semula sebesar Rp24.448.568.000,- menjadi Rp24.802.955.000,-

Tabel 2.1. Perubahan Anggaran Sasaran Kegiatan dan Sasaran Tahun 2024

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Anggaran	
	Semula	Menjadi
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp24.448.568.000,-	Rp24.802.955.000,-
✓ Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.180.204.000,-	Rp9.149.841.000,-
✓ Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Rp16.268.364.000,-	Rp15.653.114.000,-

Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2024 berdasarkan revisi anggaran tahun 2024 disajikan dalam table berikut.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan, Sasaran, Anggaran, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2024

Sasaran Kegiatan dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp24.448.568.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.180.204.000	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp16.268.364.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan 4,81
		8	Hasil Evaluasi AKIP	AA 90,05
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan 3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Seiring dengan penetapan Perjanjian Kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana aksi pencapaian target-target kinerja tahunan untuk 13 indikator yang tertuang dalam perjanjian kinerja.

Rencana aksi tersebut memuat rincian kegiatan dan langkah-langkah kegiatan setiap triwulan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pencapaian target untuk setiap IKU. Rincian rencana aksi pencapaian target kinerja tahun 2024 ditampilkan dalam Lampiran 2.

Trust	Membangun kepercayaan publik dengan mengedepankan kualitas laporan hasil pemeriksaan dengan menjunjung tinggi IIP dengan konsisten.
Educate	Meningkatkan pemahaman melalui edukasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang bersih dan transparan kepada <i>stakeholder</i> .
Good Governance	Terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta mendukung keterbukaan informasi publik.
Accountable	Bekerja secara profesional, transparan, dan objektif.
Sinergy	Membangun kerjasama secara aktif dengan <i>stakeholder</i> dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

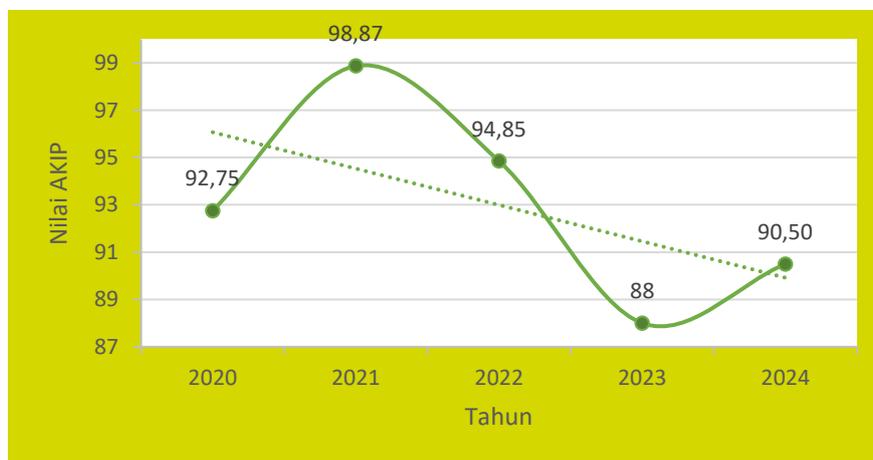
A. HASIL EVALUASI AKIP

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Inspektorat Utama (Itama) BPK telah melakukan evaluasi atas penilaian mandiri AKIP tahun 2024 pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi dilakukan secara *desk evaluation* terhadap empat komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tujuan dari evaluasi atas penilaian mandiri AKIP tahun 2024 secara umum untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan yang diperlukan; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Berdasarkan nota dinas Inspektur Utama nomor 501/ND/XI/11/2024 tanggal 18 November 2024 perihal Penyampaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 pada Satuan Kerja Eselon II di Lingkungan BPK, hasil evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebesar **90,50** dengan predikat **AA (Sangat Memuaskan)**. Grafik berikut menyajikan tren nilai evaluasi AKIP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Renstra 2020 – 2024.



Gambar 3.1. Tren Capaian Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2024

Pada tahun 2023, hasil evaluasi AKIP mengalami penurunan cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan metode evaluasi AKIP sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Nilai AKIP tahun 2024 apabila dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar **2,50** yang diperoleh dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja. Meningkatnya hasil penilaian menunjukkan perbaikan yang telah dilakukan dalam proses pencapaian kinerja untuk Lakin tahun 2023. Rincian nilai komponen AKIP tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Rincian Nilai Komponen AKIP Tahun 2023 dan 2024

No.	Komponen	Bobot	Tahun 2023	Tahun 2024	Hasil evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	27,60	Telah memenuhi kriteria
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00	27,00	Telah memenuhi kriteria
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,90	12,90	Belum memenuhi kriteria
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50	23,00	Telah memenuhi kriteria
Total		100	88	90,50	
Predikat			A	AA	

Sumber: Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri AKIP tahun 2024

Sesuai tabel di atas, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat hal-hal yang menjadi catatan untuk dilakukan penyempurnaan pada komponen pelaporan kinerja. Secara lebih terinci hasil evaluasi menyatakan bahwa pada Lakin tahun 2023 belum menyajikan seluruh informasi terkait upaya-upaya yang mendukung capaian/ketidakcapaian pada setiap target Indikator Kinerja Utama (IKU).

Atas hasil evaluasi tersebut, di tahun 2024 selain berusaha meningkatkan capaian kinerja, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga berkoordinasi dengan Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan Inspektorat Utama terkait *template* dan struktur Lakin terbaru serta melakukan perbaikan dalam penyusunan Lakin tahun 2024. Dengan demikian, setiap target IKU secara konsisten dapat menyajikan informasi kualitas dan upaya-upaya yang mendukung capaian maupun ketidaktercapaian.

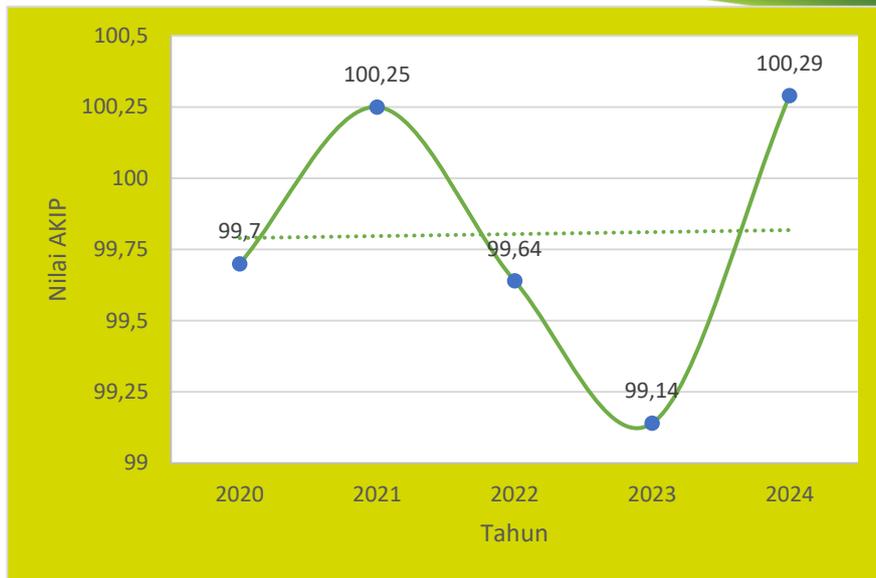
B. CAPAIAN KINERJA

Pengelolaan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 diawali dengan penetapan target untuk 13 IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran dalam rangka pencapaian target dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi Prisma Kinerja (<https://prisma.bpk.go.id/>) dengan melampirkan bukti-bukti kegiatan pada portal kolaborasi. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pengukuran dilakukan bersama-sama dengan Direktorat PSMK.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Melakukan validasi atas target kinerja tahun 2024;
2. Menyusun rencana aksi tahun 2024;
3. Melakukan monitoring pencapaian kinerja tahun 2024 setiap triwulan;
4. Melakukan inventarisasi permasalahan pencapaian kinerja tahun 2024; dan
5. Melakukan komunikasi dan koordinasi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan pihak terkait dalam rangka mendorong pencapaian kinerja.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 sebesar 100,29. Gambar berikut menyajikan tren skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam periode Renstra 2020 – 2024.



Gambar 3.2. Tren Skor Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Gambar di atas memperlihatkan peningkatan skor jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 maupun 2023. Dalam rangka mendorong capaian kinerja, upaya-upaya perbaikan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menunjukkan hasil yang nyata.

Skor capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas 13 indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Skor
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	80,80%	80,80
	1.1. Hasil QA dan QC Satker (40%)		100,00%	
	1.2. Hasil evaluasi EPP (60%)		68,00%	
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	2.1. Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		8	
	2.2. Jumlah LHP yang diterbitkan		8	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,66%	104,88
	3.1. Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		11.412	
	3.2. Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti		3.028	
	3.3. Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		88	
	3.4. Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		76	
	3.5. Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke <i>auditee</i>		14.604	

No	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Skor
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,3%	10,3
	4.1. Realisasi pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya		2	
	4.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/signifikan lainnya		2	
	4.3. Alokasi penambahan skor		0,30	
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
	5.1. (REF) Jumlah pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang disetujui dan dipenuhi oleh BPK, yang melibatkan pemeriksa di Satuan Kerja Pemeriksaan terkait		1	
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,7%	101,7
	6.1. Realisasi pemeriksaan tematik lokal		6	
	6.2. Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		6	
	6.3. Alokasi penambahan skor		1,7	
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan 4,81	Memuaskan 4,84	100,62
8	Hasil Evaluasi AKIP	A 90,05	A 90,50	100,50
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	98,93%	100,95
	9.1. Tingkat pemanfaatan aplikasi SISDM (20%)		19,57%	
	9.2. Tingkat pemanfaatan aplikasi JASMIN (15%)		15,00%	
	9.3. Tingkat pemanfaatan aplikasi SMP (20%)		20,00%	
	9.4. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP (20%)		19,36%	
	9.5. Tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL (25%)		25,00%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan (MP)	100%	104, %	104,00
	10.1. Tingkat penyusunan Innovative Practice		100%	
	10.2. Tingkat pelaksanaan aktivitas MP		108%	
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan 3,80	Memuaskan 4,25	105,00
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100,00
	12.1. Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		116	
	12.2. Jumlah seluruh pegawai		116	
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%	92,50%	105,00
	13.1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		85%	
	13.2. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		100%	
Skor Kinerja Tahun 2023			100,29	

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Terdapat Empat IK yang **Belum** Mencapai Target
 - 1.1. IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
2. Terdapat IK **Sama Dengan** Target yang Ditetapkan

- 2.1. IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
- 2.2. IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan
- 2.3. IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

- 3. Terdapat IK **Melebihi** Target yang Ditetapkan
 - 3.1. IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
 - 3.2. IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemenuhan Pemeriksaan Tematik Nasional
 - 3.3. IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
 - 3.4. IKU 7. Indek Implementasi Nilai Dasar BPK
 - 3.5. IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP
 - 3.6. IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
 - 3.7. IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
 - 3.8. IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
 - 3.9. IKU 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi capaian kinerja 4 tahun terakhir (dalam tahun Renstra 2020 – 2024) adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Lima Tahun Terakhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun				
			2024	2023	2022	2021	2020
	Skor Kinerja		100,29	99,14	99,76	100,25	99,7
Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi	IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	80,80%	80,80%	83,75%	88,67%	81,67%
	IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,66%	75,44%	79,38%	80,77%	80,51%
	IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,3%	101,65%	100,91%	100,41%	101,10%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun				
			2024	2023	2022	2021	2020
	IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100,05%	100,43%	100%
	IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	101,7%	100,09%	100,42%	100,28%	100%
	IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan 4,81	Sangat Memuaskan 4,84	Sangat Memuaskan 4,74	Sangat Memuaskan 4,69	Sangat Memuaskan 4,59	Sangat Memuaskan 4,58
	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	AA 90,05	AA 90,50	A 88	AA 94,85	AA 95,87	AA 92,75
	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	98,93%	99,66%	94,44%	99,19%	99,19%
	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	104%	103,18%	110%	100%	100%
	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan 3,8	Memuaskan 4,25	Memuaskan 3,91	Memuaskan 3,69	Memuaskan 3,91	Memuaskan 3,81
	IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	99,21%	100%	98,02%	97,17%
	IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	92,50%	90,47%	90,10%	91,20%	91,86%

Berikut perbandingan realisasi capaian tahun 2024 dengan target lima tahun.

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Lima Tahun

Indikator Kinerja		Target Tahun Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	80,80%	80,80
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	78,66%	104,88
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	101,7%	101,7
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81	4,84	100,62
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	AA 90,05	AA 90,50	100,5
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%	98,93%	100,95
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	104%	104
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,25	105
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,50%	88%	88,50%	84,50%	92,50%	105

Dari dua tabel di atas, terlihat progres peningkatan maupun penurunan realisasi yang terjadi pada masing-masing IKU jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan target tahun 2024 sebagai periode akhir Renstra 2020-2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mampu

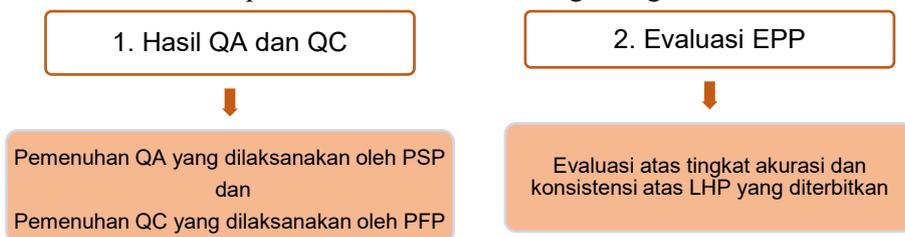
menyesuaikan pencapaian kinerja dengan kebijakan perubahan target tahunan pada beberapa IKU selama periode Renstra 2024-2024. Peningkatan skor kinerja tahun 2024 tidak terlepas dari kebijakan tersebut, khususnya terkait IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar. Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan telah menunjukkan hasil untuk indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target pada tahun sebelumnya. Selain itu, terlihat juga selama periode Renstra 2020 – 2024 IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi IKU pada tahun terakhir implementasi Renstra 2020 – 2024 yang telah mencapai maupun yang melebihi target diharapkan dapat menjadi *baseline* atas peningkatan organisasi pada pelaksanaan Renstra periode mendatang. Berikut uraian capaian masing-masing indikator kinerja tahun 2024.

IKU 1

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tingkatan, yaitu internal satuan kerja melalui *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) serta eksternal satuan kerja melalui evaluasi Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (Direktorat EPP). Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.



Perkembangan capaian IKU 1 periode tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5. Perkembangan Capaian IKU 1 Tahun 2020 - 2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	81,67%	88,67%	83,75%	80,80%	80,80%
Capaian	81,67	88,67	83,75	80,80	80,80
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+7,00	-4,92	-2,95	-
Persentase Realisasi Tahunan terhadap target Tahun 2024	81,67%	88,67%	83,75%	80,80%	80,80%

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak terdapat perubahan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 realisasi IKU tersebut sebesar 80,80% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 80,80%. Realisasi tersebut masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100%.

Sejak penyusunan Lakin tahun 2023, terdapat perubahan metode pengukuran dimana aspek capaian hasil revidi Itama tidak lagi digunakan dalam formula perhitungan. Sehingga hasil tersebut diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tahun 2024 dengan pengukuran sub IKU sebagai berikut.

1. Sub IKU 1.1 Hasil QA dan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan sesuai RKP (bobot 40%) dengan capaian 100%. Hasil tersebut diperoleh dari pemenuhan QA dan QC atas 23 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan. Secara administratif, seluruh tim pemeriksa atas 23 LHP tersebut telah melengkapi dokumen terkait QA dan QC. Hal ini juga menunjukkan proses pengendalian mutu telah diselesaikan oleh para pejabat fungsional pemeriksa dan proses pemerolehan keyakinan mutu telah dilaksanakan oleh para pejabat struktural; dan
2. Sub IKU 1.2 Hasil evaluasi EPP (bobot 60%) dengan total capaian 68% dikarenakan masih adanya temuan pada aspek akurasi dan konsistensi. Hasil tersebut diperoleh dari evaluasi atas 15 LHP yang dimuat dalam IHPS I tahun 2024. Untuk aspek akurasi sebesar 86,67% dikarenakan belum terpenuhinya aspek akurasi angka pada 2 LHP dan untuk aspek konsistensi sebesar 40% dimana masih terdapat 9 LHP yang belum memenuhi aspek konsistensi dengan total 15 kasus.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan 88 PFP dan 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.944.442.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.943.139.450,00 atau 99,98%. Dengan sumber daya tersebut, upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU adalah sebagai berikut.

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai dengan SPKN, Kode Etik, dan PMP melalui pemenuhan QC pemeriksaan yang dilaksanakan oleh PFP serta QA yang dilaksanakan oleh PSP;
2. Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan (lapming) dan diskusi;
3. Pembentukan tim perencanaan dan pengkajian hasil pemeriksaan;
4. Pembentukan tim revidi LHP untuk menjamin hasil pemeriksaan yang kredibel dan andal sesuai standar pemeriksaan;
5. Melaksanakan *cross review* antar tim pemeriksaan LKPD TA 2023;
6. Memastikan penulisan dan akurasi serta bebas *typo* atas pemeriksaan LKPD TA 2023;
7. Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan secara elektronik; dan
8. Pelaksanaan kegiatan MP yang mendukung dan berkaitan tema pemeriksaan.

Namun demikian, upaya-upaya tersebut di atas belum mampu mendorong capaian atas IKU ini. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini pada tahun 2024 masih sama atau stagnan. Hal ini dikarenakan masih adanya temuan terkait akurasi dan konsistensi. Terdapat juga faktor nonteknis terkait *timeline* pelaksanaan pemeriksaan di lapangan yang bertepatan dengan libur perayaan Idul Fitri tahun 2024. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya penyusunan laporan dikarenakan waktu penyelesaian laporan cukup singkat, mengingat LHP harus sudah diserahkan ke entitas dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan keuangan *unaudited* diterima.

Persentase realisasi atas IKU ini sebesar 80,80% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau masih di bawah target. Namun demikian, peningkatan kualitas LHP untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang *zero defect* serta sesuai dengan SPKN dan PMP merupakan suatu keharusan jika berkaitan dengan target atas IKU ini. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan inovasi dan perbaikan pada tahun berikutnya dalam rangka mendorong capaian atas IKU ini dengan strategi sebagai berikut.

1. Menyusun aktivitas-aktivitas secara periodik dan berkelanjutan dalam rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi atas pencapaian tahun sebelumnya serta optimalisasi pelaksanaannya;
2. Memastikan setiap tahap pemeriksaan dari perencanaan sampai dengan pelaporan telah melalui proses QC oleh PFP dan QA oleh PSP;
3. Meningkatkan kehati-hatian, ketelitian, dan juga kecermatan dalam reuiu LHP; dan
4. Memastikan tim pemeriksa telah melakukan verifikasi akurasi dan konsistensi LHP.

IKU 2

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP Kinerja dan DTT dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) yang bertujuan mendorong peningkatan kualitas LHP BPK.

Perkembangan capaian IKU 2 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.6. Perkembangan Capaian IKU 2 Tahun 2020 - 2024

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Perubahan realisasi (+/-)	-	-	-	-	-
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100% atau telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian sebesar 100%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan kesesuaian jumlah LHP yang diterbitkan dengan harapan penugasan.

Pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan 3 LHP Kepatuhan dan 5 LHP Kinerja. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 88 PFP dan 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.944.442.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.943.139.450,00 atau 99,98%. Dengan sumber daya tersebut berikut upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini.

1. Menyusun program pemeriks dan harapan penugasan sesuai panduan ataupun kelompok kerja (pokja) pemeriks tematik sebelum pelaksanaan pemeriks;
2. Menyusun kesimpulan pemeriks yang sesuai dengan program pemeriks dan harapan penugasan; dan
3. Mematuhi *timeline* pemeriks yang ditetapkan pokja pemeriks tematik.

Upaya-upaya tersebut di atas telah mendorong ketercapaian target atas IKU ini, yang jika dibandingkan dengan tahun 2023 ataupun dalam lima tahun terakhir selalu menunjukkan realisasi yang sama. Ketercapaian target IKU ini karena seluruh penugasan pemeriks

menghasilkan *output* LHP yang sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam program pemeriksaan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini berkaitan dengan *timeline* pemeriksaan yang mengikuti arahan pokja masing-masing tematik. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemeriksaan lapangan tidak dapat dilaksanakan secara serentak yang juga berimbas pada prosesi penyerahan laporan.

Persentase realisasi IKU ini sama dengan target yang ditetapkan tahun 2024 yakni 100%. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini pada tahun selanjutnya dengan melaksanakan seluruh kegiatan pemeriksaan yang telah direncanakan serta menyusun program pemeriksaan dan harapan penugasan sesuai panduan.

IKU 3

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan entitas pemeriksaan (*auditee*) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Rekomendasi yang dilakukan pengukuran adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak tahun 2005. Tujuan dari indikator ini untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Perkembangan capaian IKU 3 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7. Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun 2020 - 2024

IKU 3 Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	80,51%	80,77%	79,38%	75,44%	78,66%
Capaian	107,35	107,69	105,84	100,58	104,88
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+0,26	-1,39	-3,94	+3,22
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	107,35%	107,69%	105,84%	100,58%	104,88%

Realisasi IKU Tingkat Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 78,66% dari target sebesar 75%, sehingga capaian sebesar 104,88%. Capaian tersebut diukur berdasarkan data IHPS I tahun 2024 dengan realisasi sub IKU sebagai berikut.

1. Sub IKU 3.1. jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 11.412;
2. Sub IKU 3.2. jumlah rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau masih dalam proses ditindaklanjuti sebanyak 3.028;
3. Sub IKU 3.3. jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 88;
4. Sub IKU 3.4 jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 76; dan
5. Sub IKU 3.5. jumlah rekomendasi yang disampaikan ke *auditee* sebanyak 14.604.

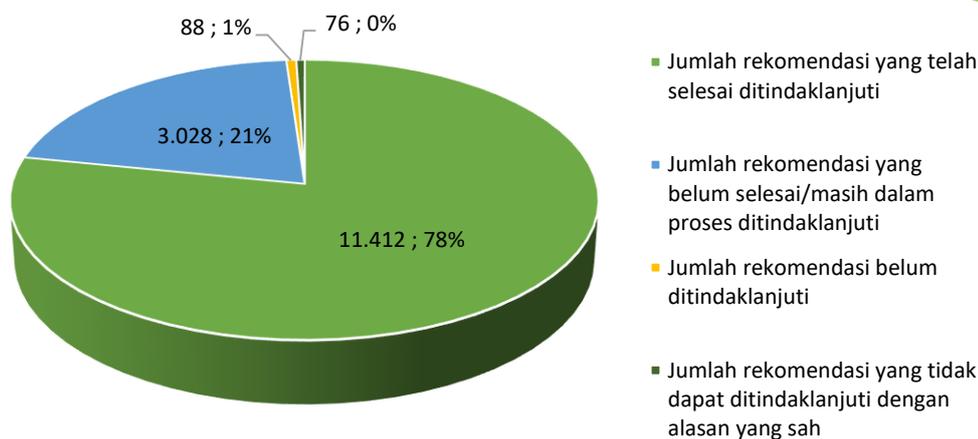


Diagram 3.1. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pelaksanaan IKU ini melibatkan 88 PFP dan 3 PSP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp327.639.000,00 dan realisasi sebesar Rp324.060.000,00 atau 98,91%. Dengan sumber daya tersebut, upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Tim Dosir;
2. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara periodik melalui aplikasi SiPTL;
3. Mendorong entitas untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dengan komunikasi dan koordinasi secara berkala; dan
4. Menginventarisasi rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan membuat alternatif penyelesaian untuk kemudian diusulkan secara berjenjang kepada Anggota VI melalui Tortama KN VI.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini pada tahun 2024 yang sebesar 78,66% memiliki tingkat realisasi yang lebih tinggi yakni meningkat sebesar 3,22% dan melampaui target tahun 2024 yang sebesar 75%. Pencapaian ini tidak terlepas dari komitmen dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Selain hal tersebut, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini aplikasi SiPTL (Sistem Pemantauan Tindak Lanjut) mampu mempercepat entitas pemeriksaan dalam melakukan peremajaan data tindak lanjut secara *online* di wilayahnya masing-masing. Hal ini juga menunjukkan komitmen dan peran aktif entitas dalam meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Berikut kendala-kendala yang dihadapi terkait pengelolaan IKU ini:

1. Ketidakjelasan waktu penyelesaian validasi untuk level kantor pusat pada aplikasi SiPTL. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya penyelesaian surat keluar atas pelaksanaan pemantauan semesteran, sehingga Perwakilan tidak dapat merilis surat ke entitas; dan
2. Formula realisasi atas IKU ini hanya memperhitungkan status 1 dan status 4, sedangkan penambahan jumlah rekomendasi atas LHP tahun berjalan seringkali tidak diimbangi dengan penambahan penyelesaian tindak lanjut oleh entitas.

Dengan terus meningkatkan penyelesaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, melakukan evaluasi permasalahan terkait rekomendasi-rekomendasi yang berlarut-larut, serta mendorong entitas untuk berkomitmen menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan setiap periode, diharapkan capaian ini dapat terus ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Persentase realisasi IKU ini telah mencapai 104,88% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang sebesar 100%. Dengan melakukan upaya-upaya di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat memenuhi target sampai untuk tahun 2025.

IKU 4

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satuan kerja masing-masing dengan satu unit kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan isu strategis, RPJMN dan SDG's.

Perkembangan capaian IKU 4 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8. Perkembangan Capaian IKU 4 Tahun 2020 - 2024

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,1%	100,41%	100,91%	101,65%	100,3%
Capaian	101,1	100,41	100,91	101,65	100,3
Perubahan Realisasi (+/-)	-	-0,69	+0,50	+0,74	-1,35
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	101,10%	100,41%	100,91%	101,65%	100,3%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional tahun 2024 sebesar 100,3% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100,3%. Realisasi IKU ini di atas target yang diharapkan meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut diukur berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional serta memperhitungkan pembobotan masing-masing peran dalam tim pemeriksaan.

Dalam upaya pencapaian target IKU ini, pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ikut serta melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya melalui Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Ketapang serta Instansi Terkait Lainnya, di Pontianak dan Ketapang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, PFP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terlibat sebagai penanggung jawab, wakil penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim dalam komposisi tim. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 48 personil PFP/PSP dalam pemeriksaan pendahuluan dan 11 personil PFP/PSP dalam pemeriksaan terinci, dengan alokasi anggaran sebesar Rp384.701.000,00 dan realisasi sebesar Rp384.336.820,00 atau 99,91%. Dengan sumber daya tersebut, upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;
2. Menyusun rencana pemeriksaan tematik sesuai arahan Badan; dan
3. Mengalokasikan jumlah pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan tematik.

Realisasi atas IKU ini pada tahun 2024 sebesar 100,3% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya anggaran sehingga mengakibatkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya tidak dapat sebanyak tahun sebelumnya yang berimbas juga pada penurunan jumlah personil yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan.

Persentase realisasi IKU ini mencapai 100,3% sedikit lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya yang menjadi program BPK. Dengan merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang mendukung kebijakan pemeriksaan yang ditetapkan pimpinan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat optimis dapat memenuhi target untuk tahun berikutnya.

IKU 5

Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti lembaga perwakilan dan APH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini dikoordinasikan oleh AUI dan PKG, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui keterlibatan PFP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Perkembangan capaian IKU 5 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.9. Perkembangan Capaian IKU 5 Tahun 2020 - 2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,43%	100,05%	100%	100%
Capaian	100	100,43	100,05	100	100
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+0,43	-0,38	-0,05	-
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	100%	100,43%	100,05%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indikator Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan pada tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%. Hasil ini sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2024 tidak terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan juga PFP pada BPK Perwakilan Kalimantan Barat tidak terlibat dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh AUI maupun PKG. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalokasikan anggaran terkait IKU ini.

Formula atas penghitungan IKU ini menetapkan realisasi 100% jika tidak ada pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan akan meningkat melalui alokasi penambahan skor jika ada pemeriksa yang terlibat dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Hal ini menjadi hambatan dalam peningkatan realisasi atas IKU ini, karena bergantung pada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, alokasi penambahan skor berdasarkan penugasan pemeriksaan saja, kegiatan lainnya seperti keterlibatan personil dalam penerjemahan LHP yang dikoordinasikan oleh PKG tidak menjadi pertimbangan untuk memperoleh alokasi penambahan skor.

Persentase realisasi atas IKU ini sebesar 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau sama dengan target yang ditetapkan. Untuk mengoptimalkan realisasi dan capaian tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya untuk responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan serta mendorong PFP untuk mengikuti seleksi pemeriksaan yang dikoordinasikan oleh AUI dan PKG.

IKU 6

Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis RPJMD dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Perkembangan capaian IKU 6 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10. Perkembangan Capaian IKU 6 Tahun 2020 - 2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,28%	100,42%	100,09%	101,7%
Capaian	100	100,28	100,42	100,09	101,7
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+0,28	+0,14	-0,33	+1,61
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	100%	100,28%	100,42%	100,09%	101,7%

Berdasarkan tabel di atas realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal tahun 2024 sebesar 101,7% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 101,7%. Realisasi IKU ini berhasil melampaui target yang ditetapkan dan diukur berdasarkan keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik lokal dengan memperhitungkan pembobotan masing-masing peran dalam tim pemeriksaan.

Dalam upaya pencapaian target IKU ini, pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ikut serta dalam empat pemeriksaan tematik lokal yang seluruhnya merupakan pemeriksaan kinerja, yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sambas dan Instansi Terkait Lainnya, di Pontianak dan Sambas;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kota Singkawang dan Instansi Terkait Lainnya di Pontianak dan Singkawang;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Instansi Terkait Lainnya, di Pontianak dan Putussibau; dan
4. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Instansi Terkait Lainnya, di Pontianak dan Sekadau.

Atas pemeriksaan tersebut, IKU ini memperoleh penambahan alokasi skor sebesar 1,70%. Pelaksanaan IKU ini melibatkan 61 personil PFP/PSP dalam pemeriksaan pendahuluan dan 37 personil PFP/PSP dalam pemeriksaan terinci dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.123.226.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.122.984.637,00 atau 99,98%. Dengan sumber daya tersebut, upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;
2. Menyusun rencana pemeriksaan tematik sesuai arahan Badan; dan
3. Mengalokasikan jumlah pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan tematik.

Realisasi IKU ini di tahun 2024 sebesar 101,7% meningkat dari realisasi tahun sebelumnya dan melebihi target tahun 2024. Hal ini tidak terlepas dari pemilihan tema pemeriksaan tematik lokal dengan mempertimbangkan isu-isu terkini yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat sehingga selaras dengan kebijakan pimpinan. Selain itu, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan APBD berada di bawah koordinasi AKN V, sedangkan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan di bawah koordinasi AKN VI. Hal ini menunjukkan dukungan dan peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemeriksaan tematik lokal.

Persentase realisasi atas IKU ini sebesar 101,7% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024, lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Untuk mempertahankan capaian ini ditahun berikutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan sepenuhnya berupaya merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's dengan tetap mempertimbangkan isu-isu terkini yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

IKU 7

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh pihak independen dengan skala hasil survei sebagai berikut.

- + 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan
- + 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- + 3,00 - 3,99 = memuaskan
- + 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai BPK atas nilai dasar BPK.

Perkembangan capaian IKU 7 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.11. Perkembangan Capaian IKU 7 Tahun 2020 - 2024

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	5	5	5	4,81
Realisasi	4,58	4,59	4,69	4,74	4,84
Capaian	91,60	91,80	93,80	94,80	100,62
Perubahan realisasi (+/-)	-	+0,01	+0,1	+0,05	+0,1
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	95,22%	95,43%	97,51%	98,54%	100,62%

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK tahun 2024 sebesar 4,84 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 4,81, sehingga tingkat capaian realisasi IKU sebesar 100,62%. Tabel di atas juga menunjukkan adanya penyesuaian target pada tahun 2024 yang merupakan kebijakan BPK Pusat, namun demikian terlihat juga tren peningkatan realisasi atas IKU ini selama periode Renstra 2020 – 2024.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai. Upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Monitoring data PFP yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan;
2. Monitoring penugasan pemeriksaan melalui dashboard Histoper, yang mana setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut melakukan pemeriksaan di entitas yang sama;
3. Memfasilitasi surat pernyataan independensi melalui aplikasi SAMPAN dan telah ditandatangani sebelum pelaksanaan pemeriksaan;
4. Melaksanakan pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP;
5. Menindaklanjuti seluruh rangkaian kegiatan survei indeks PMPRB dengan menyiapkan data responden internal; dan
6. Mengkomunikasikan ke seluruh pegawai jadwal pelaksanaan survei dan melakukan monitoring tingkat penyelesaian pengisian survei.

Realisasi atas IKU ini pada tahun 2024 sebesar 4,84 meningkat sebesar 0,10 dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan lebih lanjut, salah satunya monitoring progres pengisian survei. Selama ini,

monitoring progres pengisian survei dilakukan dengan meminta *screenshot* atas *feedback* dari pihak ketiga kepada para responden, yang mana dokumen ini sama untuk seluruh responden. Seringkali responden mengisi melalui *link* teman, sehingga pada aplikasi pihak ketiga nama yang bersangkutan tidak terdaftar dan nama pemilik *link* terekam lebih dari satu kali. Hal ini mengakibatkan selisih jumlah responden. *Feedback* terima kasih atas pengisian survei sebaiknya juga dikirimkan oleh pihak ketiga melalui email pegawai masing-masing sehingga dokumen tersebut valid digunakan untuk monitoring ataupun bukti SKP pegawai.

Persentase realisasi atas IKU ini sebesar 100,62% jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan pemahaman pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terhadap nilai dasar sangat memuaskan dan menunjukkan proses internalisasi nilai-nilai dasar sudah cukup memadai. Dengan tetap menerapkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan juga penyempurnaan proses monitoring diharapkan hasil ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan untuk tahun selanjutnya.

IKU 8

Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK dengan predikat penilaian sebagai berikut.

- AA = Sangat memuaskan (>90 – 100)
- A = Memuaskan (>80 – 90)
- BB = Sangat baik (>70 – 80)
- B = Baik (>60 – 70)
- CC = Cukup (>50 – 60)
- C = Kurang (>30 – 50)
- D = Sangat kurang (>0 – 30)

Tujuan dilaksanakannya indikator ini untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja di BPK.

Perkembangan capaian IKU 8 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12. Perkembangan Capaian IKU 8 Tahun 2020 - 2024

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A 86	A 87	A 88	A 89	AA 90,05
Realisasi	AA 92,75	AA 95,87	AA 94,85	A 88	AA 90,5
Capaian	107,85	110,20	107,78	98,88	100,5
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+3,12	-1,02	-6,85	+2,5
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	103%	106,46%	105,33%	97,72%	100,5%

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 sebesar 90,05% dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 90,05 dengan predikat AA (Sangat Memuaskan), sehingga capaian realisasi sebesar 100,50. Capaian tersebut diperoleh dari pembobotan atas empat komponen berikut.

1. perencanaan kinerja (bobot 30%), dengan nilai 27,60;
2. pengukuran kinerja (bobot 30%), dengan nilai 27,00;
3. pelaporan kinerja (bobot 15%), dengan nilai 12,90; dan
4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%), dengan nilai 23.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh unit kerja. Upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023;
2. Melakukan pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengkomunikasikan manual perhitungan IKU ke unit kerja terkait;
3. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja triwulanan dan mengkomunikasikan hasil capaian ke seluruh unit kerja;
4. Menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi Itama atas lakin tahun sebelumnya;
5. Menyusun laporan kinerja sesuai panduan; dan
6. Melakukan inventarisasi dokumen-dokumen pendukung dalam rangka penilaian AKIP.

Realisasi atas IKU ini pada tahun 2024 mengalami kenaikan 2,5 dari tahun sebelumnya dan berhasil kembali memperoleh predikat sangat memuaskan seperti halnya dua tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan capaian tahun selanjutnya, upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Memastikan informasi upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun berjalan dan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya tersaji dalam Lakin untuk setiap target IKU;
2. Meningkatkan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya inovasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan kinerja; dan
3. Melakukan cascading kinerja hingga ke level individu untuk meningkatkan capaian kinerja.

Persentase realisasi IKU ini sebesar 100,5% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang artinya melebihi target. Dengan menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap realisasi IKU ini dapat meningkat di tahun berikutnya

IKU 9

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satuan kerja diharapkan memanfaatkan layanan TIK yang disediakan oleh Biro TI secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK. Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM dan JASMIN) serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SIAP, dan SiPTL).

- ✚ Pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan kebaruan (*updating*) data masing-masing pegawai pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, informasi pegawai, serta seminar.

- ✦ Pemanfaatan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan *log akses* aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas surat masuk untuk pejabat struktural sampai level pejabat struktural terkahit dalam satuan kerja.
- ✦ Pemanfaatan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satuan kerja.
- ✦ Pemanfaatan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan *log akses* aplikasi SiAP pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemeriksa yang masuk dalam surat tugas pemeriksaan, yang meliputi inisiasi sub-pemeriksaan, pengisian HP3, reviu dan pelaporan (misalnya temuan, KHP, dan LHP) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan baik interim/pendahuluan maupun terinci.
- ✦ Pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada satuan kerja.

Tujuan indikator ini untuk mendorong satuan kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Perkembangan capaian IKU 9 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.13. Perkembangan Capaian IKU 9 Tahun 2020 - 2024

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98%
Realisasi	99,19%	99,19%	94,44%	99,66%	98,93%
Capaian	104,41	103,32	97,36	101,7	100,95
Perubahan Realisasi (+/-)	-	-	-7,75	+5,22	-0,73
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	101,21%	101,21%	96,37%	101,69%	100,95%

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi tahun 2024 sebesar 98,93% dari target sebesar 98%, sehingga capaian realisasi sebesar 100,95. Capaian tersebut diperoleh dari pembobotan atas sub IKU berikut.

1. Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM (bobot 20%), dengan capaian 19,57%;
2. Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN (bobot 15%), dengan capaian 15%;
3. Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP (bobot 20%), dengan capaian 20%;
4. Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP (bobot 20%), dengan capaian 19,36%; dan
5. Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL (bobot 25%), dengan capaian 25%.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai. Upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Mengkomunikasikan hasil IKU ini setiap triwulan dan perubahan-perubahan manual IKI dengan unit kerja terkait;
2. Monitoring pemutakhiran data kepegawaian pada aplikasi SISDM yang dilakukan oleh Subbag SDM;

3. Mendorong pejabat struktural sampai dengan eselon IV untuk menindaklanjuti seluruh surat pada aplikasi JASMIN;
4. Monitoring penyelesaian penginputan seluruh pemeriksaan pada aplikasi SMP;
5. Mewajibkan pemeriksa untuk menyelesaikan proses pemeriksaan pada aplikasi SIAP;
6. Monitoring penyelesaian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan entitas melalui aplikasi SiPT; dan
7. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan TI, untuk kemudian dikomunikasikan dengan unit kerja terkait.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU ini untuk tahun 2024 mengalami penurunan. Dari hasil pembobotan sub IKU terlihat pencapaian kurang optimal terjadi pada pemanfaatan aplikasi SISDM dan SIAP. Hal ini dikarenakan adanya perubahan manual IKU pada penghitungan pemanfaatan aplikasi SISDM untuk triwulan IV yang semula lima komponen menjadi enam komponen. Untuk komponen seminar pada aplikasi SISDM masih terdapat sepuluh pegawai yang belum berhasil memenuhi, sedangkan pada aplikasi SIAP terdapat tiga entitas pemeriksaan interim yang belum menyelesaikan validasi HP3 sampai dengan level ketua tim.

Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian IKU ini yakni sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh pegawai untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban terkait pemanfaatan TI. Selain hal tersebut, belum adanya keselarasan kebijakan antara Pokja pemeriksaan tematik dengan Biro TI selaku pengampu IKU ini terkait pemanfaatan aplikasi SIAP untuk pemeriksaan pendahuluan.

Persentase realisasi IKU ini mencapai 100,95% jika dibandingkan dengan target tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan capaian di tahun selanjutnya dengan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Melakukan monitoring mandiri untuk seluruh pemanfaatan aplikasai-aplikasi pemeriksaan dan penunjang;
2. Mewajibkan seluruh pemeriksa memanfaatkan aplikasi SIAP untuk seluruh pemeriksaan; dan
3. Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka pemanfaatan TI.

IKU 10

Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan (MP) dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Tingkat penerapan MP diukur melalui dua sub IKU sebagai berikut.

1. *Innovative Practice* menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas Best Practice yang ada dan dapat direalisasikan melalui

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best Practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan BP yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya dengan

menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*. Aspek kebaruan yang dimaksud berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh satuan kerja selain pengusul BP. Satuan kerja yang mengimplementasi BP perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas BP yang diimplementasi.

2. Aktivitas manajemen pengetahuan, merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing*/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pascaaktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, *mentoring* sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Tujuan indikator ini untuk mengukur sampau sejauh mana satuan kerja mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan penerapan pengetahuan.

Perkembangan capaian IKU 10 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.14. Perkembangan Capaian IKU 10 Tahun 2020 - 2024

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	110%	103,18%	104%
Capaian	100	100	110	103,18	104
Perubahan Realisasi (+/-)	-	-	10	-6,82	+0,82
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	110%	103,18%	104%

Realisasi IKU Tingkat penerapan manajemen pengetahuan tahun 2024 sebesar 104% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 104. Capaian realisasi tersebut diperoleh berdasarkan pembobotan dua komponen sub IKU berikut.

1. Sub IKU 10.1 Tingkat penyusunan/penerapan BP (bobot 50%) dengan skor 100
Pada tahun 2024 melalui Nota Dinas Kepala Direktorat PSMK nomor 572/ND/XII.1/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penetapan *Best Practice* Tahun 2024 dan Pengakuan Sub IKU Tingkat Penyusunan *Innovative Practice* Tahun 2024, “**Dashboar Histoper**” ditetapkan sebagai salah satu BP tahun 2024. Sehubungan nota dinas tersebut BPK Perwakilan provinsi Kalimantan Barat tidak wajib menyusun usulan/replikasi BP tahun 2024 untuk pemenuhan capaian sub IKU ini.
“**Dashboard Histoper**”, merupakan usulan BP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 dan telah disetujui berdasarkan nota dinas Kepala Direktorat PSMK Nomor48/ND/XII.1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024.
2. Sub IKU 10.2 Tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan (bobot 50%) dengan skor 106,37%.

Skor tersebut diperoleh dari 17 kegiatan manajemen pengetahuan yang dapat dikategorikan ke dalam empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan dengan rincian sebagai berikut.

- a. Diklat sebanyak dua aktivitas (diklat dan *workshop*);
- b. Bantuan rekan sejawat (*Peer Assist*) sebanyak dua aktivitas;
- c. KTF sebanyak 12 aktivitas (KTF, ekspose, sosialisasi, dan FGD); dan
- d. Evaluasi pasca aktivitas sebanyak satu aktivitas.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai dengan Subbagian SDM sebagai unit kerja pengampu. Upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Mendorong pegawai khususnya pemeriksa untuk menuangkan kegiatan diskusi panduan pemeriksaan tematik dalam laporan manajemen pengetahuan;
2. Menginisiasi kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai terkait isu-isu terkini;
3. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan unit kerja pusat; dan
4. Menjaring inovasi-inovasi yang dilakukan unit kerja dalam pelaksanaan tupoksi untuk kemudian diterapkan sebagai *best practice*.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi atas IKU ini di tahun 2024 mengalami peningkatan dan juga melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kuantitas dari kegiatan aktivitas manajemen pengetahuan yang tinggi dan juga jenis aktivitas manajemen pengetahuan melebihi target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni sulitnya mendorong pegawai untuk menuliskan dan mendokumentasikan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam melaksanakan tupoksi.

Persentase realisasi IKU ini telah mencapai 104% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang artinya telah melebihi target. Ditahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya untuk mempertahankan capaian ini dengan melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan secara rutin setiap triwulannya. Selain itu, mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari setiap unit kerja untuk diusulkan sebagai *best practice* ataupun mengidentifikasi *best practice* pada satker lain untuk dilakukan replikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

IKU 11

Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan kerja sama dan komunikasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan.

Pengukuran indikator ini dilakukan oleh pihak independen dengan skala hasil survei sebagai berikut.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 🚩 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan | 🚩 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan |
| 🚩 3,00 - 3,99 = memuaskan | 🚩 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan |

Indikator ini bertujuan untuk mendorong perwakilan agar meningkatkan efektifitas, kualitas hubungan, kerja sama, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan.

Perkembangan capaian IKU 11 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.15. Perkembangan Capaian IKU 11 Tahun 2020 - 2024

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Realisasi	3,81	3,91	3,69	3,91	4,25
Capaian	100,26	102,89	97,11	102,89	105
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+0,1	-0,22	+0,22	+0,34
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	100,26%	102,89%	97,11%	102,89%	111,84%

Realisasi IKU Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi tahun 2024 sebesar 4,25 (Sangat Memuaskan) dari target sebesar 3,8 (Memuaskan), sehingga tingkat capaian realisasi IKU sebesar 105. Hal ini mengindikasikan persepsi para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berada pada rentang sangat memuaskan.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh unit kerja. Upaya-upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut.

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tupoksi BPK melalui website maupun sosial media;
2. Menyediakan media informasi dan komunikasi yang mudah diakses baik secara *online* maupun *offline* melalui PIK;
3. Merespon setiap permintaan informasi yang disampaikan oleh pemangku kepentingan dan menanggapi umpan balik yang diberikan;
4. Memfasilitasi permintaan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah terutama dibidang pendidikan melalui kegiatan magang, BPK *Goes to School* dan Kuliah Lapangan; dan
5. Melakukan silaturahmi dengan para pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu terkini.

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan realisasi tahun 2024 yang sebesar 4,25 dari tahun sebelumnya yang sebesar 3,91 dan melebihi target yang telah ditetapkan yang sebesar 3,8. Terlihat juga tren peningkatan dimana capaian tahun 2024 merupakan capaian tertinggi sepanjang periode Renstra 2020 – 2024. Sehingga dapat diartikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengkomunikasikan tentang BPK kepada IPH, entitas pemeriksaan, media, lembaga pemerintah maupun akademisi selama tahun 2024 berhasil meningkatkan realisasi capaian.

Kendala yang dihadapi berkaitan manajemen waktu dengan pimpinan BPK, yakni menyusun kegiatan di antara tingginya jadwal pemeriksaan.

Persentase realisasi IKU ini telah mencapai 111,84% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 100% yang artinya melebihi target. Dengan tetap menerapkan berbagai langkah di atas, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi di tahun selanjutnya dengan melaksanakan hal-hal berikut.

1. Meningkatkan layanan informasi baik secara *online* maupun *offline* melalui PIK;
2. Responsif terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; dan
3. Menjalani komunikasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah.

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
2. Standar jam pelatihan bagi nonpemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU Nomor 5 Tahun 2014);
3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk nonpemeriksa;
4. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di satuan kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satuan kerja baru. Jika setelah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada pada satuan kerja lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Perkembangan capaian IKU 12 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16. Perkembangan Capaian IKU 12 Tahun 2020 - 2024

IKU 12 Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	97,17%	98,02%	100%	99,21%	100%
Capaian	97,17	98,02	100	99,21	100
Perubahan Realisasi (+/-)	-	+0,85	+1,98	-0,79	+0,79
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	97,17%	98,02%	100%	99,21%	100%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi tahun 2024 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian sebesar 100%. Pada tahun 2024 dari 116 pegawai seluruhnya telah memenuhi standar jam pelatihan minimal yang ditetapkan.

Realisasi IKU ini di tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh pegawai serta Subbagian SDM selaku pengampu IKU ini secara aktif dan komunikatif melakukan upaya-upaya berikut.

1. menyampaikan laporan monitoring diklat melalui atasan langsung, mengingatkan, dan menghimbau para pegawai untuk memenuhi JP diklat minimum;
2. melaksanakan diklat *off class* di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk pemeriksa bekerjasama dengan Badan Diklat PKN; dan
3. menginformasikan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat PKN baik *off class*, *online* maupun *self learning* sehingga dapat diikuti oleh seluruh pegawai.

Persentase realisasi IKU ini telah mencapai 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yang dapat diartikan sesuai target. Namun dari tabel di atas terlihat bahwa selama periode Renstra 2020 – 2024 realisasi atas IKU ini belum konsisten dan baru dua kali berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni pada tahun 2022 dan 2024. Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian realisasi IKU ini yakni:

1. Tema dan kuota diklat yang ditawarkan bersamaan dengan jadwal penugasan lainnya;
2. Pegawai yang telah mendaftar diklat tidak dipanggil karena keterbatasan kuota peserta diklat;
3. Diklat *self learning* menjadi pilihan terakhir jika tidak berhasil mengikuti diklat *off class* dan *online*; dan
4. Kesadaran pegawai untuk segera memenuhi minimal JP yang ditetapkan masih kurang.

Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12, untuk tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya dengan melakukan monitoring secara berkala, memfasilitasi diklat *off class* di kantor perwakilan dan juga mendorong pegawai untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan Badan Diklat PKN.

IKU 13

Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat kinerja anggaran mengukur capaian kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran yang dilakukan satuan kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri. Pengukuran dilakukan dengan melihat nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Pengukuran indikator ini melalui pembobotan atas dua sub IKU berikut.

1. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Aspek ini mengukur dua variabel, yaitu:
 - a. Efektifitas, diukur dengan capaian RO (75%)
 - b. Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK (10%) dan efisiensi (15%)
2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) merupakan rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja. Aspek ini mengukur beberapa variabel, yaitu:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi halaman III DIPA (15%)
 - c. Penyerapan anggaran (20%)
 - d. Belanja kontraktual (10%)
 - e. Penyelesaian tagihan (10%)
 - f. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - g. Capaian output (25%)
 - h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Tujuan pengukuran indikator ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Perkembangan capaian IKU 13 Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.17. Perkembangan Capaian IKU 13 Tahun 2020 - 2024

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,50%	88%	88,50%	84,50%
Realisasi	91,86%	91,20%	90,10%	90,47%	92,5%
Capaian	105,59	104,23	102,39	102,22	105
Perubahan Realisasi (+/-)	-	-0,66	-1,1	+0,37	+2,03
Persentase Realisasi Tahunan terhadap Target Tahun 2024	108,71%	107,93%	106,63%	107,07%	109,47%

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran pada tahun 2024 sebesar 92,5% dari target sebesar 84,5%, sehingga capaian sebesar 105%. Realisasi tersebut telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan yang diperoleh berdasarkan pembobotan atas sub IKU berikut.

1. Hasil pengukuran EKA Perencanaan anggaran (bobot 50%) dengan nilai sebesar 85, rincian variabel sebagai berikut.
 - a. Efektifitas 100, bobot penialian 75%
 - b. Efisiensi:
 - a. Penggunaan SBK 100, bobot penilaian 10%
 - b. Efisiensi SBK 0, bobot penilaian 15%

2. Hasil pengukuran EKA pelaksanaan anggaran (bobot 50%) dengan nilai sebesar 100, rincian variabel sebagai berikut.
 - a. Revisi DIPA dengan nilai 100; yang menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas wajar.
 - b. Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 100; yang menunjukkan deviasi halaman III DIPA dalam batas toleransi.
 - c. Penyerapan Anggaran dengan nilai 100; yang menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai target.
 - d. Belanja Kontraktual dengan nilai 100; yang menunjukkan penyampaian kontrak-kontrak tepat waktu.
 - e. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 100; yang menunjukkan penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.
 - f. Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 99,99; yang menunjukkan pengelolaan UP/TUP telah sesuai namun masih belum optimal.
 - g. Capaian output dengan nilai 100; yang menunjukkan pencapaian output sudah sesuai target.
 - h. Dispensasi SPM (pengurang) dengan nilai 0 yang menunjukkan tidak terdapat dispensasi SPM yang melewati batas pengajuan.

Pelaksanaan IKU ini melibatkan seluruh unit kerja dengan Subbagian Keuangan sebagai unit kerja pengampu. Realisasi atas IKU ini di tahun 2024 sebesar 92,5% dan mengalami peningkatan

jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut berikut upaya-upaya yang dilakukan selama tahun 2024.

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengkomunikasikan dengan seluruh unit kerja terkait usulan revisi;
2. Menginformasikan realisasi penyerapan anggaran secara periodik dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran;
3. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) triwulanan dari masing-masing unit kerja dan menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulan;
4. Menggunakan aplikasi Point-K untuk penyelesaian tagihan;
5. Memantau ketepatan waktu penyelesaian tagihan, penyampaian data kontraktual; serta pertanggungjawaban UP/TUP;
6. Monitoring capaian *output* secara berkala, agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan peningkatan capaian dan memastikan ketepatan waktu atas realisasi volume RO; dan
7. Melakukan komunikasi dengan Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Kalimantan Barat dan KPPN Pontianak selaku mitra kerja dalam peningkatan kinerja anggaran.

Hambatan yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini yakni pelaksanaan kegiatan yang seringkali berubah-ubah mengakibatkan perencanaan anggaran belum konsisten dan penyerapan anggaran belum optimal. Selain itu, perubahan metode pengukuran juga menjadi penyebab nilai EKA Tahun 2024 menurun. Penurunan drastis terjadi pada variabel efisiensi SBK, pengukuran EKA Perencanaan Anggaran juga bergantung pada indeks satuan SBK yang ditetapkan dalam PMK. Tahun 2024, usulan indeks SBK dihitung berdasarkan kondisi ideal dan riil atas target RO yang akan dicapai, sedangkan pada pengukuran EKA Perencanaan Anggaran menggunakan realisasi atas pagu anggaran yang dikelola, sehingga menimbulkan *gap* antara indeks realisasi anggaran dengan indeks satuan SBK. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengukuran EKA Perencanaan Anggaran menjadi tidak optimal.

Persentase realisasi atas IKU ini jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 109,47% artinya melebihi target yang ditetapkan. Dalam upaya mempertahankan capaian pada tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

1. Merencanakan kegiatan dengan lebih optimal dengan memperhatikan ketersediaan SDM, waktu serta sarana prasarana;
2. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala agar pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efisien; dan
3. Melakukan komunikasi dengan seluruh unit kerja terkait upaya maupun hambatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

C. ANALISIS EFISIENSI

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi 2 yaitu Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi informasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendorong otomatisasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi, meningkatkan penyediaan akses data yang terpusat serta mengoptimalkan layanan secara *online*. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi baik dari sisi waktu maupun biaya serta memperluas aksesibilitas.

Berikut upaya efisiensi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

1. Mendorong seluruh pegawai untuk secara optimal menggunakan layanan TIK yang disediakan BPK.
 - a. Penggunaan Jasmin dalam administrasi persuratan internal BPK dapat menekan biaya pengiriman surat, ATK untuk pencetakan maupun efisiensi dari sisi waktu;
 - b. Penggunaan email ataupun Whatsapp untuk pengiriman surat dengan pihak eksternal, kecuali untuk surat maupun dokumen yang harus dikirimkan secara *hardfile*;
 - c. Penerapan SiPTL dengan entitas pemeriksaan sehingga efektif dari sisi waktu dan juga biaya (jamuan); dan
 - d. Pemanfaatan SMP untuk menginput penugasan pemeriksaan yang langsung terintegrasi dengan SISDM. Otomatisasi aktivitas ini mempercepat aliran kerja dan meminimalisasi kesalahan.
2. Penggunaan jaringan dan server yang disediakan oleh Subbagian Umum dan TI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai *database* pengelolaan dan penyimpanan data digital oleh setiap unit kerja. Setiap unit kerja menyimpan arsip digital aktif maupun inaktif pada server perwakilan. Penerapan ruang penyimpanan bersama ini dapat menghemat biaya pemeliharaan maupun ruang penyimpanan digital pada PC yang tersedia di masing-masing unit kerja. Selain itu sangat efektif dari sisi waktu karena dapat diakses dari mana saja.
3. Pemanfaatan portal perwakilan untuk mendorong penyediaan akses data yang terpusat.
<https://portal.bpk.go.id/sites/pontianak/Pages/Index.aspx>
Portal perwakilan menyediakan histori data ataupun *link* untuk masuk ke dalam aplikasi penunjang yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat seperti aplikasi Sampan (*database* surat tugas), Histoper (*database* histori penugasan PFP), Monpera (*database* monitoring pemeriksaan), Implora (*database* pengelolaan kinerja), maupun *dashboard* lainnya yang seluruhnya menyediakan arsip digital. Oleh karena itu, dapat dikatakan portal merupakan gudang informasi sekaligus sarana komunikasi internal BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mempermudah seluruh pegawai dalam memperoleh data ataupun dokumen yang diperlukan, tidak ada duplikasi penyimpanan sehingga dapat menghemat waktu (*real time*) dan biaya (tidak diperlukan biaya pencetakan).

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

Efisiensi pengelolaan BMN merujuk pada prinsipnya meminimalkan biaya dan meningkatkan manfaat untuk memperoleh hasil yang optimal. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berupaya menerapkan pengelolaan BMN dalam batasan-batasan standar kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Berikut upaya efisiensi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga untuk meningkatkan penerimaan negara.

Efisiensi yang diperoleh berupa PNBPN melalui pendapatan sewa dengan menyewakan rumah negara yang dipergunakan oleh para pejabat dan juga sewa penempatan mesin ATM pada halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemindahtanganan maupun penghapusan BMN yang sudah tidak dapat dipergunakan dengan baik sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan. BMN yang tidak lagi digunakan dijual dengan cara yang efisien dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, seperti melalui lelang atau penjualan terbuka. Penjualan dilakukan dengan harga yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar.
3. Penyimpanan arsip dalam bentuk digital sehingga mengurangi belanja modal, menghemat biaya pemeliharaan serta biaya pengelolaan dokumen fisik. Arsip digital dapat mengurangi kebutuhan terhadap ruang penyimpanan fisik yang besar serta biaya terkait pengelolaan arsip manual. Selain itu, digitalisasi membantu mengurangi penggunaan kertas, yang mendukung kebijakan ramah lingkungan.
4. Melakukan pemeliharaan secara terjadwal dan preventif untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga, yang sering kali lebih mahal dan mengganggu operasional;
5. Optimalisasi penggunaan BMN yang masih layak pakai;
6. Pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIMAN dan SAKTI dapat mempermudah proses administrasi dan pelaporan. Hal ini tentunya membawa efisiensi baik dari segi waktu, biaya, maupun pengelolaan BMN secara keseluruhan.

3. Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran sudah dimulai sejak perencanaan, optimalisasi pelaksanaan, kemudian monitoring dan evaluasi. Pengukurannya melalui evaluasi tingkat kinerja anggaran yang telah diuraikan pada IKU 13 di atas.

Berikut upaya efisiensi yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Melaksanakan perencanaan anggaran sesuai kebutuhan
 - a. Perencanaan pemeriksaan yang bersifat *mandatory* sesuai dengan jumlah entitas dan SDM yang dimiliki
 - b. Alokasi belanja modal sesuai dengan kebutuhan BMN
 - c. Alokasi belanja pegawai berdasarkan jumlah SDM
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sehingga dapat dilakukan penajaman kegiatan maupun anggaran serta memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya output.
3. Optimalisasi digitalisasi arsip dalam seluruh kegiatan sehingga dapat mengurangi belanja bahan

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Efisiensi SDM linear dengan produktivitas, sederhananya jika produktivitas SDM tinggi efisiensi juga tinggi. Penempatan pegawai sesuai jenjang jabatan, kompetensi yang dimiliki masing-masing pegawai serta mempertimbangkan jumlah beban kerja pada masing-masing unit kerja merupakan salah satu upaya pengelolaan SDM dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Memberikan kesempatan seluruh SDM untuk mengikuti diklat maupun melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan seperti yang telah diuraikan dalam IKU 12 dan IKU 10. Hal ini

merupakan salah satu cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat menjadi lebih produktif dan mampu mengisi peran sesuai jenjang jabatan dengan lebih baik.

D. PERUBAHAN BUDAYA KERJA

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan budaya kerja pada tahun 2021, dari semula menggunakan slogan SSSIIP (Senyum, Salam Sapa, Independensi, Integritas, Profesionalisme) menjadi TEGAS (*Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Synergy*).



Gambar 3.3. Budaya Kerja #TEGAS

Budaya kerja merupakan cerminan, bentuk penerapan dalam tindakan atas nilai-nilai dasar dan upaya membangun kebiasaan baik dalam organisasi. Dalam rangka pengimplementasian slogan ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan beberapa kegiatan, seperti penyusunan buku saku budaya kerja, sosialisasi budaya kerja kepada pegawai, pengarahan, dan pengimplementasian budaya kerja oleh pelaksana pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam layanan-layanan terkait tugas dan fungsi. Selain itu tagline #TEGAS juga selalu disertakan dalam produk-produk kehumasan yang berupa *flyer*, spanduk, buku, sosial media dan sebagainya.

E. REALISASI ANGGARAN

Diperlukan dukungan anggaran dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan anggaran tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Anggaran, Rincian Output, dan Indikator Kerja

Anggaran (Setelah Perubahan)	Realisasi	Rincian Output	Realisasi Anggaran	Realisasi Keluaran	Indikator
Rp9.149.841.000,-	Rp9.144.525.998,-	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	Rp64.600.000,-	159	IKU Strategis: ↓ IKU 1 ↓ IKU 2 ↓ IKU 3 ↓ IKU 4 ↓ IKU 5 ↓ IKU 6
		Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	Rp14.259.000,-	1	
		Sumbangan IHPS Perwakilan	Rp94.102.075,-	2	
		Laporan Profil Entitas Perwakilan	Rp12.596.000,-	15	
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan	Rp215.340.000,-	30	
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah pada BPK Perwakilan	Rp108.720.000,-	30	
		Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	Rp691.769.473,-	12	
		LHP BPK Perwakilan	Rp7.943.139.450,-	23	
		Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Rp13.291.993.279,-	1	
		Rp15.653.114.000,-	Rp15.651.580.074,-	Layanan Perkantoran	
Layanan Sarana Internal	Rp349.860.000,-			2	
Layanan Prasarana Internal	Rp1.774.926.795,-			21	
Rp24.802.995.000,-	Rp24.796.106.072,-				

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh alokasi anggaran digunakan untuk mendukung tercapainya target kinerja. Total realisasi anggaran sebesar Rp24.796.106.072,- dalam rangka mencapai sasaran strategis “**meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi**”, yang terdiri dari realisasi sasaran “**meningkatnya pemeriksaan berkualitas**” sebesar Rp9.144.525.998,- dan realisasi sasaran “**meningkatnya layanan pemeriksaan**” sebesar Rp15.651.580.074,-.

F. INOVASI

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2024 telah mengembangkan beberapa inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian kinerja. Inovasi tersebut masih dipergunakan dan terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaannya sampai saat ini.



Gambar 3.4. Inovasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

1. Genta (Agenda Kegiatan Kepala Perwakilan)

<https://lookerstudio.google.com/reporting/d8faa33b-0a6a-4d74-ab6f-d8a770464278/page/fxTUD?s=oeb0xnkY-80>

- ✚ Inovasi ini baru dikembangkan pada Juni 2024, untuk memfasilitasi kebutuhan akan *database* kegiatan kepala perwakilan yang dapat memudahkan dalam menyusun jadwal kegiatan. Tampilan yang dalam bentuk dashboard lebih nyaman dilihat, penginputan sangat sederhana menggunakan googlesheet;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni manajemen BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat khususnya kepala perwakilan; dan

IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 11 berkaitan dengan respon terhadap permintaan maupun kunjungan dari pihak eksternal.

2. SAMPAN (Sistem Administrasi Penugasan)

<http://10.125.1.10:8080/login>

- ✚ Inovasi ini baru dikembangkan sejak Februari 2023, dalam rangka menyediakan *database* penugasan yang lebih efisien dan terintegrasi baik untuk kegiatan pemeriksaan maupun sekretariat. Menyederhanakan proses input, otorisasi dan mengeleminasi kelemahan-kelemahan pada Ms.Excel;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni seluruh pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 10 berkaitan dengan aktivitas manajemen pengetahuan, IKU 1, IKU 2, IKU 4, IKU 6, dan IKU 13 berkaitan dengan penyediaan data penugasan yang akuntabel.

3. Monpera (Monitoring Penomoran dan Surat Pemeriksaan)

<https://lookerstudio.google.com/reporting/94ff0969-e82e-45be-8998-2bb87493e69f/page/p2zszngdw2c>

- ✚ Monpera mulai dikembangkan pada awal tahun 2023 untuk meyakinkan tingginya arus komunikasi terkait penomoran kegiatan pemeriksaan melalui grup Whatsapp. Penomoran disini meliputi P2, LHP, LHPP, Surat keluar LHP dan juga BAST, hal ini dikarenakan tidak seluruh pegawai memiliki akses ke aplikasi persuratan dan penomoran tersebut diperlukan sebelum dilakukan pencetakan dokumen. Penambahan-penambahan menu pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan data pemeriksaan, yaitu 1) *timeline* kegiatan pemeriksaan sejak terbitnya surat penugasan sampai dengan penandatanganan BAST serta 2) data TLRHP dan Keruda tiap semester;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni seluruh PFP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 1, IKU 2, IKU 4, IKU 6, dan IKU 13 berkaitan dengan penyediaan output pemeriksaan.

4. Portal Internal Terpadu-Keuangan (Point-K)

<https://sites.google.com/view/point-k/home>

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Maret 2022 dalam rangka tata kelola SPJ perjalanan dinas khususnya pemeriksaan. Inovasi ini memberikan tutorial dan konsultasi penyusunan SPJ sampai dengan pemrosesannya dalam satu *dashboard* sehingga pelaksana BPK yang melaksanakan perjalanan dinas memahami tata cara pemrosesan SPJ dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban beserta kelengkapannya sesuai ketentuan pembayaran yang disyaratkan. Dampak dari penerapan inovasi ini adalah proses verifikasi menjadi lebih mudah sehingga siklus pencairan anggaran menjadi lebih cepat;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini pegawai pelaksana kegiatan perjalanan dinas pemeriksaan dan verifikatur pada subbagian Keuangan; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 13 dan IKU 8 yang berkaitan dengan evaluasi dan implementasi kinerja anggaran.

5. Histori Pemeriksaan (Histoper)

https://lookerstudio.google.com/reporting/0f5e6d07-3d67-4ba1-affb-b6b8ff161e58/page/p_1dh7x9kyvc

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Juni 2022, dalam rangka memfasilitasi kebutuhan akan data riwayat pemeriksaan dan keahlian pemeriksa untuk keperluan penyusunan tim pemeriksaan. Sehingga Histoper menyajikan data-data pemeriksa, kompetensi, riwayat pemeriksaan, dan benturan kepentingan;
- ✚ Pada Tahun 2023 Histoper telah disetujui sebagai *best practice* berdasarkan nota dinas Kepala Direktorat PSMK No,48/ND/XII.1/1/2024 tanggal 17 Januari 2024;
- ✚ Pada tahun 2024 melalui nota dinas Kepala Direktorat PSMK nomor 572/ND/XII.1/8/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Penetapan *Best Practice* Tahun

2024 dan Pengakuan Sub IKU Tingkat Penyusunan *Innovative Practice* Tahun 2024, “**Dashboar Histoper**” ditetapkan sebagai salah satu *best practice* tahun 2024;

- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni pemberi tugas dan pemeriksa; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 10 pengakuan sebagai *best practice*.

6. Monitoring Statistik LHKPN (Monistik-LHKPN)

<https://lookerstudio.google.com/reporting/5738d3b4-e0a2-4ec8-b4f3-770be2e2251d/page/WI6vC>

- ✚ Inovasi ini dikembangkan sejak Maret 2022 dalam rangka melakukan monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Wajib Laporkan LHKPN, sehingga dapat mendorong wajib lapor untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Monistik-LHKPN menyediakan data berupa daftar dan infografis, serta memberikan kecepatan dan kemudahan akses informasi;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni wajib lapor LHKPN dan subbagian SDM; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 9 terkait pemenuhan kewajiban melaporkan verifikasi LHKPN.

7. BPK Kalbar Tanggap

- situs web: <https://kalbar.bpk.go.id>;
- permintaan informasi: <https://kalbar-ppid.bpk.go.id>;
- pengaduan: <https://kalbar-ppid.bpk.go.id/>;
- instagram: @bpkri.kalbar; dan
- twitter: @bpkrikalbar.

- ✚ BPK Kalbar Tanggap merupakan media informasi dan komunikasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan masyarakat dan *stakeholder*. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan informasi atas kegiatan-kegiatan BPK, kebutuhan atas informasi data yang dimiliki BPK, dan forum komunikasi dengan BPK;
- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni masyarakat dan lembaga pengguna informasi; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 7 berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan IKU 11 sebagai sarana komunikasi dengan seluruh stakeholder BPK.

8. Pojok SiPTL

- ✚ Pojok SiPTL merupakan penataan ruang yang difungsikan sebagai area publik untuk membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan pemerintah daerah. Hal ini untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mengimplementasikan

aplikasi SiPTL. Pojok SiPTL terletak di Lantai 1 Gedung Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

- ✚ Penerima manfaat dari inovasi ini yakni pemerintah provinsi/kab/kota di wilayah Kalimantan Barat; dan
- ✚ IKU yang terdampak dari inovasi ini yakni IKU 3 berkaitan dengan persentase penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK.

G. PENGHARGAAN

Selain upaya-upaya dalam rangka pencapaian kinerja, pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berhasil memperoleh capaian dan prestasi melalui penghargaan internal BPK maupun eksternal.

1. Penghargaan Internal

Peringkat II Pemutakhiran Data Mandiri Terbaik untuk Jumlah Pegawai ≤ 150 pegawai yang diselenggarakan oleh Biro SDM.



Gambar 3.5. Piala Penghargaan Internal

2. Penghargaan Eksternal

- Satker dengan nilai IKPA terbaik Semester I TA 2024 Lingkup Kanwil DJPb Prov Kalimantan Barat dengan nilai IKPA 100,00 kategori pagu $>15M$ s.d. $25M$ yang diselenggarakan oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
- Nilai IKPA Sempurna Satuan Kerja Lingkup KPPN Pontianak Periode Semester I Tahun 2024 yang diselenggarakan KPPN Pontianak



Gambar 3.6. Piagam Penghargaan Eksternal

Perilaku **#TEGAS**



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPK RI. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berharap laporan kinerja ini dapat memberi informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh indikator target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, pencapaian skor kinerja tahun 2024 sebesar 100,29 mengalami peningkatan sebesar 1,15 dibandingkan tahun 2023 yang mencapai skor kinerja 99,14.

Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja maksimal tergambar pada capaian terhadap indikator kinerja seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja yang Mencapai Target dan Belum Mencapai Target

Indikator Kinerja	Keterangan Capaian
1. IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;	Belum mencapai target
2. IKU 4 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;	Mencapai target dan realisasi tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023
3. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;	
4. IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	Mencapai target dan realisasi tahun 2024 sama dengan tahun 2023
5. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan;	
6. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;	Mencapai target dan realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023
7. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;	
8. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;	
9. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP;	
10. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;	
11. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan	
12. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;	
13. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran.	

Atas IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang belum mencapai target dan juga selama periode Renstra 2020 – 2024 belum menunjukkan perbaikan, dalam dua tahun terakhir realisasi atas IKU ini tetap sama yakni 80,80% dari target 100%.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target IKU ini yakni kecukupan waktu dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan mempengaruhi ketelitian dan kecermatan penyelesaian LHP.

Atas 12 indikator yang telah mencapai target pada tahun 2024, terdapat dua indikator yang mengalami penurunan capaian realisasi dari tahun sebelumnya, yaitu:

1. IKU 4 realisasi 100,30% dari target 100% di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 realiasi 101,65% dari target 100% sehingga terdapat penurunan capaian realisasi sebesar 1,35%.
2. IKU 9 realisasi sebesar 98,93% dari target 98% pada tahun 2024. Sedangkan di tahun 2023 realiasi sebesar 99,66% dari target 98% sehingga terdapat penurunan capaian realisasi sebesar 0,73%.

Hambatan yang dihadapi terkait dua indikator diatas yakni

- a. Keterbatasan anggaran dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan akan mempengaruhi perhitungan alokasi penambahan skor;
- b. Perubahan manual IKU yang dilaksanakan pada akhir periode pelaporan kinerja mengakibatkan kelalaian dalam melakukan monitoring; dan
- c. Belum adanya keselarasan kebijakan antara Pokja pemeriksaan tematik dengan Biro TI terkait pemanfaatan aplikasi SIAP untuk pemeriksaan pendahuluan.

Terdapat dua inidikator yang telah mencapai target namun capaian sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan hal yang wajar, dikarenakan formula pengukuran berdasarkan pelaksanaan RKP dan tidak ada skor tambahan serta bergantung pada permintaan dari para pemangku kepentingan.

1. IKU 2 realisasi 100% dari target 100% di tahun 2024, sama dengan realisasi pada tahun 2023;
2. IKU 5 realisasi 100% dari target 100% di tahun 2024, sama dengan realisasi pada tahun 2023.

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan langkah-langkah strategis berikut.

1. melakukan inventarisasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait;
2. menyusun rencana aksi pencapaian kinerja dengan lebih optimal serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong pencapaian kinerja; dan
3. menyempurnakan dan mengembangkan inovasi-inovasi yang dapat mendorong pencapaian kinerja.

Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 sekiranya dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi perbaikan dan mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan peran BPK di masa mendatang.

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMPIRAN

Scorecard Tahun 2024 (prisma.bpk.go.id)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
 PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2024

Perjanjian Kinerja / Peta Strategi Detail Scorecard Indikator Kinerja Keluaran (IKK)

Expand Refresh Calculate Export Edit Detail & Dokumen

Nama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Score
↳ BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	Scorecard	Triwulan...				100.29 ●
↳ Sasaran Kegiatan. Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Sasaran Strategis	Triwulan...				100.29 ●
↳ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	80,80 %	80.8 ●
↳ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan...	75,00%	75,00%	78,66 %	104.88 ●
↳ IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,30 %	100.3 ●
↳ IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	101,70 %	101.7 ●
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	4,81	4,81	4,84	100.62 ●
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan...	90,05	90,05	90,50	100.5 ●
↳ IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	IKU	Triwulan...	98,00%	98,00%	98,93 %	100.95 ●
↳ IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	IKU	Triwulan...	100,00%	100,00%	104,00 %	104 ●
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	4,25	105 ●
↳ IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	IKU	Bulanan	100,00%	100,00%	100,00 %	100 ●
↳ IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan...	84,50%	84,50%	92,50 %	105 ●

Berita Acara Validasi Data Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024



**BERITA ACARA VALIDASI
VALIDASI DATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024**

SATKER : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

NAMA IKU		SEBELUM VALIDASI		SETELAH VALIDASI		CATATAN
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100,00%	80,80%	100,00%	80,80%	Sesuai
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100%	100,00%	Sesuai
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75,00%	78,66%	75,00%	78,66%	Sesuai
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100,00%	100,30%	100,00%	100,30%	Sesuai
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100,00%	100%	100,00%	100%	Sesuai
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100,00%	101,70%	100,00%	101,70%	Sesuai
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,84	4,81	4,84	Sesuai
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	90,05	90,50	Sesuai
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98,00%	98,93%	98,00%	98,93%	Sesuai
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	104,00%	100%	104,00%	Sesuai
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,25	3,80	4,25	Sesuai
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Sesuai
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%	92,50%	84,50%	92,50%	Sesuai

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Seksi MAKIN I,

Sonia Mocharjono Puteri
Sonia Mocharjono Puteri
NIP 198005252007082001

LO PSMK,

Siti Munawaroh
Siti Munawaroh
NIP 197604162002122001

Manjajar IKU,

Mochamad Imam Asyhari
Mochamad Imam Asyhari
NIP 197702072003121001

Inputer IKU,

Desak Putu Dewi Ariyani
Desak Putu Dewi Ariyani
NIP 198101302002122002



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

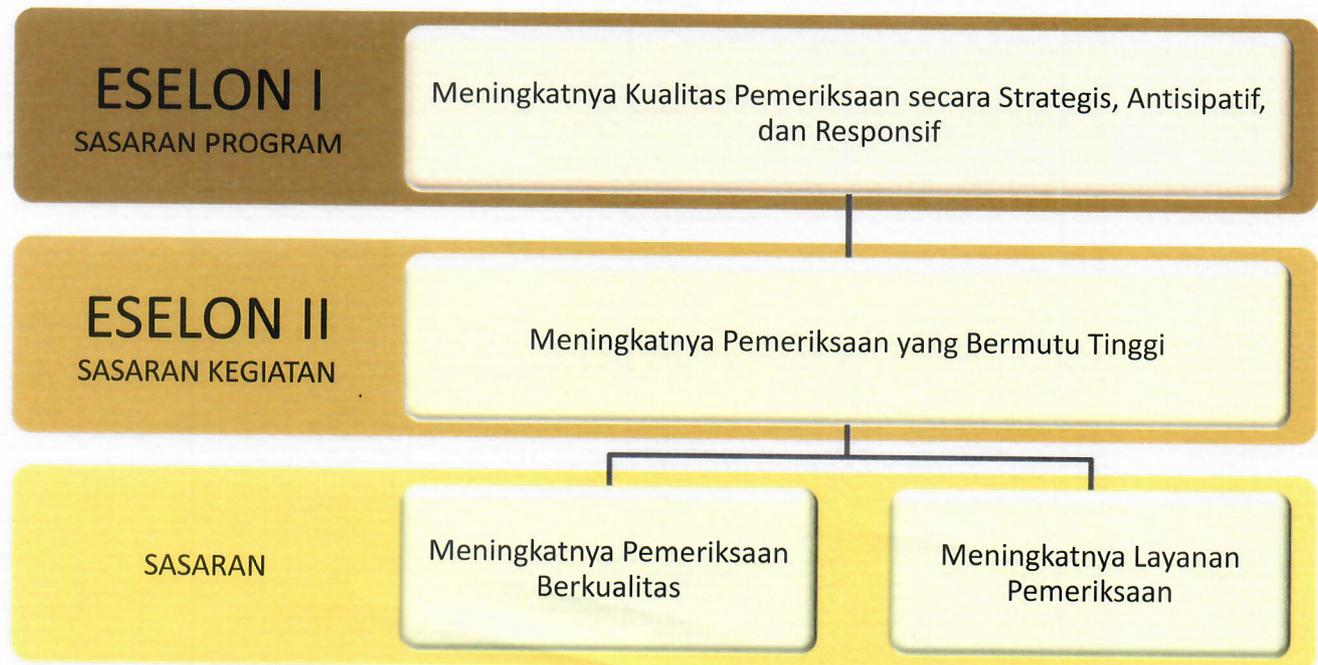
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA., CFrA., ACPA., FCPA.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp24.448.568.000	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.180.204.000	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp16.268.364.000	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)
		8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



**Laode Nusriadi, S.E., M.Si., CA., Ak., CSFA.,
CFrA., ACPA., FCPA.**

Pihak Pertama,



**Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA.,
CSFA.**

NOTA DINAS

Nomor 83/ND/XIX.PNK/4/2024

Kepada Yth. : Kepala Direktorat Utama Renvaja
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024
Tempat, tanggal : Pontianak, 17 April 2024

Sehubungan nota dinas Bapak nomor 126/ND/XII/04/2024 perihal Permintaan penyusunan rencana aksi pencapaian target kinerja unit/satuan kerja dan masukan atas manual IKU Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan rencana aksi dimaksud sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ttd

Wahyu Priyono

 NIP 197006011991031002 

Tembusan: Kepala Direktorat PSMK



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

Unit/Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun : 2024

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	<p>Triwulan I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) - Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I - Pembentukan tim perencanaan dan pengkajian hasil pemeriksaan - Pembentukan tim revidi LHP untuk menjamin hasil pemeriksaan yang kredibel dan andal sesuai standar pemeriksaan <p>Triwulan II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 15 entitas - Melaksanakan <i>cross revidi</i> antar tim pemeriksaan LKPD TA 2023 - Memastikan penulisan dan akurasi serta bebas typo atas pemeriksaan LKPD TA 2023

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan Semester I secara elektronik 	
							<p>Triwulan III</p> <ul style="list-style-type: none"> Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan Quality Assurance (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I Pelaksanaan kegiatan MP yang mendukung dan berkaitan tema pemeriksaan semester II 	
							<p>Triwulan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Semester II Melaksanakan <i>cross reviu</i> antar tim pemeriksaan LKPD TA 2023 Memastikan penulisan dan akurasi serta bebas typo atas pemeriksaan LKPD TA 2023 Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan Semester II secara elektronik 	
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	<p>Tw II</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024 Pemenuhan kesesuaian simpulan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester I <p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan/kesesuaian simpulan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester I I 	
							Tw IV <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2024 - Melaksanakan dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan Semester I secara elektronik - Pemenuhan kesesuaian simpulan dengan harapan penugasan atas pemeriksaan Semester I I 	
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Tw I <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Dosir - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Mendorong entitas untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL Tw II <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Mendorong entitas untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL - Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengan mengundang entitas secara <i>offline</i> - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS) - Menginventarisasi rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan membuat alternatif penyelesaian 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>untuk kemudian diusulkan secara berjenjang kepada Anggota VI melalui Tortama KN VI</p> <p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Mendorong entitas untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL <p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL - Mendorong entitas untuk segera menyelesaikan rekomendasi BPK dan melakukan penginputan melalui aplikasi SIPTL - Melaksanakan pembahasan TLRHP Semester I dengan mengundang entitas secara <i>offline</i> - Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL - Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS) - Menginventarisasi rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan membuat alternatif penyelesaian untuk kemudian diusulkan secara berjenjang kepada Anggota VI melalui Tortama KN VI
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	-	-	-	100%		<p>Tw I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional - Menyusun rencana pemeriksaan tematik sesuai arahan Badan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
	Tematik Nasional							<p>Tw II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional - Menyusun rencana pemeriksaan tematik sesuai arahan Badan <p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional - Menyusun rencana pemeriksaan tematik sesuai arahan Badan - Mengalokasikan jumlah pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan tematik - Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan tematik <p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan tematik
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%		<p>Tw I s.d. Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan anggaran jika ada permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan - Melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan sesuai arahan Badan
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%		<p>Tw I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal - Menyusun rencana pemeriksaan tematik lokal sesuai arahan Badan

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<p>Tw II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal - Menyusun rencana pemeriksaan tematik lokal sesuai arahan Badan
								<p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal - Menyusun rencana pemeriksaan tematik lokal sesuai arahan Badan - Melakukan koordinasi dengan Pokja terkait pelaksanaan pemeriksaan tematik lokal - Mengalokasikan jumlah pemeriksa untuk pelaksanaan pemeriksaan tematik - Menyusun kajian dan KAK pemeriksaan tematik
								<p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeriksaan tematik lokal
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (4,81)	-	-	-	Sangat Memuaskan (4,81)		<p>Tw I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD. - Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP - Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja <p>Tw II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci LKPD

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pengarahan dalam rangka pemeriksaan Semester I
								Tw III <ul style="list-style-type: none"> - Pakta Integritas seluruh Tim Pemeriksa saat pemeriksaan terinci Semester II - Melaksanakan pengarahan dalam rangka pemeriksaan Semester II
								Tw IV <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong seluruh pegawai untuk mengisi survei indeks Implementasi Nilai Dasar
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA (90,05)	-	-	-	AA (90,05)		Tw I <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024 - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku
								Tw II <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi
								Tw III <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi - Inventarisasi dokumen-dokumen pendukung dalam rangka penilaian AKIP

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024 (3)	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian (8)	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) (9)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku - Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi 	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	28%	65%	75%	98%	<p>Tw I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan TI - Menginformasikan media-media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan TI, melakukan pendampingan atau sosialisasi - Mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan Biro TI <p>Tw II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan TI - Menginformasikan media-media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan TI, melakukan pendampingan atau sosialisasi 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
							<ul style="list-style-type: none"> - Mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan Biro TI - Monitoring pemanfaatan aplikasi SISDM dalam rangka peningkatan database pegawai - Monitoring pemanfaatan SIAP dan SMP atas pemeriksaan Semester I 	
							<p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan TI - Menginformasikan media-media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan TI, melakukan pendampingan atau sosialisasi - Mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan Biro TI 	
							<p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol) - Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan - Menginventarisir permasalahan-permasalahan terkait pemanfaatan TI - Menginformasikan media-media yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan-hambatan dalam pemanfaatan TI, melakukan pendampingan atau sosialisasi 	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<ul style="list-style-type: none"> - Mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan Biro TI - Monitoring pemanfaatan SIAP dan SMP atas pemeriksaan Semester II
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	25% (1 aktivitas MP)	37,5% (1 aktivitas MP)	50% (1 aktivitas MP)	100% (1 aktivitas MP, 1 BP)	*minimal 4 jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda dalam tahun berjalan	Tw I
								<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2023 - Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (diklat)
								Tw II
								<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (bantuan rekan sejawat)
Tw III								
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (ekspose) - Menyampaikan usulan BP 								
Tw IV								
<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (forum berbagi pengetahuan) 								
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)		Tw I s.d. IV <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit - Menjalin komunikasi dengan entitas terkait informasi-informasi sebelum dan setelah pemeriksaan - Mengundang entitas untuk mengkomunikasikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja											Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)	
(1)	(2)		TW I			TW II			TW III			TW IV				(8)
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%													Desember	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Mengajukan proposal permohonan diklat LKPD - Melaksanakan diklat LKPD di Kantor Perwakilan - Menyusun laporan diklat LKPD - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai - Menyusun laporan monitoring diklat pegawai untuk Tw I <p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai
			5%	10%	15%	20%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV		(7)	(8)		
														<p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai - Menyusun laporan monitoring diklat pegawai untuk Tw II <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai - Menyusun laporan monitoring diklat pegawai untuk Tw III <p>Oktober :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja										Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I		TW II		TW III		TW IV		(8)	(9)		
													November : - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai Desember : - Usulan diklat melalui SISDIKLAT dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. - Monitoring jam diklat pegawai dan menginventarisir topik pengembangan kompetensi pegawai - Menyusun laporan monitoring diklat pegawai Tw IV	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%	84,5%		Tw I - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2024 dan Kebijakan TA. 2024 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran - Menyusun RPD - Menyusun data capaian output dan menginventarisasi capaian yang masih dinilai rendah - Melakukan penajaman kegiatan secara berkala, optimalisasi dan efisiensi anggaran - Mengkomunikasikan capaian dan menginventarisasi masukan-masukan dari seluruh unit kerja dalam rangka pencapaian target Tw II - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2024 dan Kebijakan TA. 2024 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran - Menyusun RPD - Menyusun data capaian output dan menginventarisasi capaian yang masih dinilai rendah	

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan)
(1)	(2)		TW I (4)	TW II (5)	TW III (6)	TW IV (7)		
								<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penajaman kegiatan secara berkala, optimalisasi dan efisiensi anggaran - Mengkomunikasikan capaian dan menginventarisasi masukan-masukan dari seluruh unit kerja dalam rangka pencapaian target - Menyusun laporan keuangan semester I
								<p>Tw III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2024 dan Kebijakan TA. 2024 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran - Menyusun RPD - Menyusun data capaian output dan menginventarisasi capaian yang masih dinilai rendah - Melakukan penajaman kegiatan secara berkala, optimalisasi dan efisiensi anggaran - Mengkomunikasikan capaian dan menginventarisasi masukan-masukan dari seluruh unit kerja dalam rangka pencapaian target
								<p>Tw IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2024 dan Kebijakan TA. 2024 - Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran - Menyusun RPD - Menyusun data capaian output dan menginventarisasi capaian yang masih dinilai rendah - Melakukan penajaman kegiatan secara berkala, optimalisasi dan efisiensi anggaran - Mengkomunikasikan capaian dan menginventarisasi masukan-masukan dari seluruh unit kerja dalam rangka pencapaian target - Menyusun laporan keuangan

Keterangan:

- Kolom (1) : *Diisi dengan nomor urut IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (2) : *Diisi dengan nomenklatur IKU Unit/Satuan Kerja.*
- Kolom (3) : *Diisi dengan Target Tahun 2024*
- Kolom (4) s.d. (7) : *Diisi dengan target maksimal setiap triwulan dengan memperhatikan proses bisnis Unit/Satuan Kerja, target tahunan, dan karakteristik masing-masing indikator kinerja.*
- Kolom (8) : *Diisi dengan rencana waktu penyelesaian.*
- Kolom (9) : *Diisi dengan rencana kegiatan/aktivitas yang mendukung pencapaian kinerja.*
Rencana kegiatan merupakan langkah-langkah dari unit/satuan kerja yang disusun secara rinci dan lengkap pada triwulan I, II, III dan IV sehingga dapat menggambarkan upaya Unit/Satuan Kerja dalam mencapai target indikator kinerja (kolom 3). Unit/Satuan kerja diharapkan dapat menggambarkan upaya-upaya yang akan dilakukan melalui rencana kegiatannya tersebut agar pada akhir tahun pencapaian kinerja dapat tercapai.

Catatan: Khusus untuk IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, mohon mencantumkan jenis Aktivitas Manajemen Pengetahuan yang akan direncanakan setiap triwulan (minimal empat jenis aktivitas manajemen pengetahuan yang berbeda selama Tahun 2024).

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2024

Kementerian : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 Satuan Kerja : 450819 BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	24,802,955,000	0	22,486,982,295	2,309,123,777	24,796,106,072	99.97 %	6,848,928
CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara	24,802,955,000	0	22,486,982,295	2,309,123,777	24,796,106,072	99.97 %	6,848,928
CI.1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	24,802,955,000	0	22,486,982,295	2,309,123,777	24,796,106,072	99.97 %	6,848,928
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,292,800,000	0	12,119,431,563	1,172,561,716	13,291,993,279	99.99 %	806,721
EBA.994 Layanan Perkantoran	13,292,800,000	0	12,119,431,563	1,172,561,716	13,291,993,279	99.99 %	806,721
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	584,987,000	0	584,660,000	0	584,660,000	99.94 %	327,000
EBB.951 Layanan Sarana Internal	234,828,000	0	234,800,000	0	234,800,000	99.99 %	28,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	350,159,000	0	349,860,000	0	349,860,000	99.91 %	299,000
FAF Pemeriksaan Keuangan Negara	10,925,168,000	0	9,782,890,732	1,136,562,061	10,919,452,793	99.95 %	5,715,207
FAF.051 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	64,600,000	0	64,600,000	0	64,600,000	100.00 %	0
FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	14,314,000	0	0	14,259,000	14,259,000	99.62 %	55,000
FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan	94,193,000	0	90,910,075	3,192,000	94,102,075	99.90 %	90,925
FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan	12,615,000	0	0	12,596,000	12,596,000	99.85 %	19,000
FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	217,839,000	0	107,980,000	107,360,000	215,340,000	98.85 %	2,499,000
FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	109,800,000	0	54,040,000	54,680,000	108,720,000	99.02 %	1,080,000
FAF.174 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	692,038,000	0	512,757,608	179,011,865	691,769,473	99.96 %	268,527
FAF.175 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,775,327,000	0	1,667,002,677	107,924,118	1,774,926,795	99.98 %	400,205
FAF.U27 LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	7,944,442,000	0	7,285,600,372	657,539,078	7,943,139,450	99.98 %	1,302,550

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Bezeeting per 31 Desember 2024

Ringkasan Bezeeting BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat 31 Desember 2025

STATISTIK PEGAWAI TETAP

1. Menurut Golongan

IV/e	: 0
IV/d	: 0
IV/c	: 3
IV/b	: 3
IV/a	: 3
Jumlah	9

III/d	: 18
III/c	: 4
III/b	: 39
III/a	: 38
Jumlah	99

II/d	: 0
II/c	: 7
II/b	: 0
II/a	: 0
Jumlah	7

PPPK	
VII	: 0
VIII	: 0
IX	: 1
Jumlah	1
Jumlah Total	116

2. Menurut Status Kepegawaian

PNS	: 115
CPNS	: 0
PPPK	: 1
Jumlah Total	116

3. Menurut Penempatan

Struktural	: 9
JFP di bawah Kepala Perwakilan	: 0
Sub Auditorat Kalbar I	: 46
Sub Auditorat Kalbar II	: 42
JFL dibawah Kepala Sekretariat Perwakilan	: 0
Sub Bagian SDM	: 2
Sub Bagian Keuangan	: 7
Sub Bagian Umum dan TI	: 5
Sub Bagian Hukum	: 1
Sub Bagian Humas dan TU	: 4
Jumlah Total	116

4. Menurut Jabatan Struktural

Kepala Perwakilan	: 1
Kepala Sekretariat Perwakilan	: 1
Kepala Sub Auditorat	: 2
Kepala Sub Bagian	: 5
Jumlah Total	9

5. Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pemeriksa Ahli Utama	: 0
Pemeriksa Ahli Madya	: 3
Pemeriksa Ahli Muda	: 12
Pemeriksa Ahli Pertama	: 73
Jumlah	88

6. Menurut Jabatan Fungsional Lainnya

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN A	: 0
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	: 0
Pranata Komputer Ahli Muda	: 0
Arsiparis Muda	: 0
Pranata Humas Pertama	: 0
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	: 1
Dokter Pertama	: 0
Perawat Terampil	: 0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	: 1
Pranata Keuangan APBN Mahir	: 2
Pranata Keuangan APBN Terampil	: 0
Pranata Komputer Pertama	: 1
Arsiparis Pertama	: 1
Pranata Komputer Terampil	: 1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	: 0
Jumlah	7

7. Menurut Jabatan Pelaksana

Penelaah Informasi dan Komunikasi Pk	: 0
Penata Keprotokolalan	: 1
Pengelola Layanan Operasional	: 1
Penelaah Teknis Kebijakan	: 6
Pengolah Data dan Informasi	: 3
Pengadministrasi Perkantoran	: 0
Dokumentalis Hukum	: 1
Belum ada SK Japel dan JF	: 0
Jumlah	12

Jumlah Total Menurut Jabatan 116

8. Menurut Jenjang Pendidikan

S3	: 0
S2	: 24
S1/D4	: 84
Sarjana Muda/D3	: 8
DI	: 0
SLTA / SMK	: 0
Jumlah Total	116

9. Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	: 75
Perempuan	: 41
Jumlah Total	116

10. Menurut Status Pernikahan

Menikah	: 72
Belum Menikah	: 42
Duda	: 1
Janda	: 1
Jumlah Total	116

11. Menurut Umur

>55 Tahun	: 0
51-55 Tahun	: 7
46-50 Tahun	: 10
41-45 Tahun	: 8
36-40 Tahun	: 14
31-35 Tahun	: 36
26-30 Tahun	: 36
< 25 Tahun	: 5
Jumlah Total	116

12. Menurut Agama

Islam	: 97
Protestan	: 12
Katholik	: 6
Budha	: 0
Hindu	: 1
Jumlah Total	116

13. Menurut Masa Kerja di Pwk

> 25 Tahun	: 0
21 - 25 Tahun	: 0
16 - 20 Tahun	: 1
11 - 15 Tahun	: 2
9 - 10 Tahun	: 4
7 - 8 Tahun	: 3
5 - 6 Tahun	: 31
2 - 4 Tahun	: 53
<2 Tahun	: 22
Jumlah Total	116

STATISTIK PEGAWAI TIDAK TETAP

1. Menurut Jenis Pekerjaan

Dokter Umum	: 1
Dokter Gigi	: 0
Perawat	: 1
Administrasi	: 0
Satuan Pengamanan	: 17
Pengemudi	: 3
Teknisi	: 1
Mekanik	: 0
Resepsionis	: 1
Jumlah Total	24

2. Menurut Jenjang Pendidikan

S1/D4	: 3
Sarjana Muda/D3	: 2
SMA/SMK	: 19
SLTP	: 0
Jumlah Total	24

3. Menurut Lama Pengabdian di Perwakilan

> 25 Tahun	: 0
21 - 25 Tahun	: 0
16 - 20 Tahun	: 9
11 - 15 Tahun	: 4
9 - 10 Tahun	: 1
7 - 8 Tahun	: 4
5 - 6 Tahun	: 2
2 - 4 Tahun	: 1
<2 Tahun	: 3
Jumlah Total	24

Menurut Umur

>55 Tahun	: 1
51-55 Tahun	: 2
46-50 Tahun	: 4
41-45 Tahun	: 4
36-40 Tahun	: 5
31-35 Tahun	: 1
26-30 Tahun	: 5
< 25 Tahun	: 2
Jumlah Total	24

Menurut Agama

5. Islam	: 23
Protestan	: 0
Katholik	: 1
Budha	: 0
Hindu	: 0
Jumlah Total	24

Menurut Jenis Kelamin

6. Laki-laki	: 20
Perempuan	: 4
Jumlah Total	24

Menurut Status Pernikahan

7. Menikah	: 17
Belum Menikah	: 7
Duda	: 0
Janda	: 0
Jumlah Total	24

#TEGAS

Trust, Educate, Good Governance, Accountable, Synergy



Jl. A. Yani, - Pontianak, 78124
Kontak : humastu.kalbar@bpk.go.id